



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **ANALISIS KLAUSA DALAM SURAT KABAR HARIAN *MEDIA INDONESIA***

### **SKRIPSI**



**RISMALASARI DALIMUNTHE  
0810722032**

**JURUSAN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2012**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**DIUJIKAN PADA HARI SENIN, 30 JULI 2012**

**ANALISIS KLAUSA DALAM SURAT KABAR**  
**HARIAN MEDIA INDONESIA**

**Disetujui oleh:**

**PEMBIMBING I,**

**PEMBIMBING II,**



Dra. Noviaty, M.Hum.  
NIP 1962 1231 1989 01 2001



Dra. Efri Yades, M.Hum.  
NIP 131 811 064

**Mengetahui :**  
**Ketua Jurusan Sastra Indonesia**  
**Fakultas Ilmu Budaya**

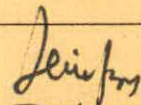
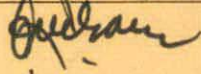
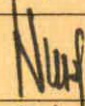


Dra. Hj. Armini Arbain, M.Hum  
NIP 1960 1006 1988 11 2001



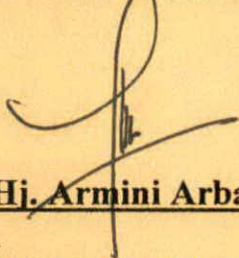
**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN TIM PENGUJI SARJANA STRATA SATU  
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
PADA TANGGAL 30 Juli 2012  
PUKUL 09.00-11.00 WIB**

**TIM PENGUJI**

| No. | Nama                        | Jabatan    | Tanda Tangan                                                                         |
|-----|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Leni Syafyaha, S.S., M.Hum. | Ketua      |    |
| 2.  | Arfinal, S.S., M.Hum.       | Sekretaris |   |
| 3.  | Dr. Gusdi Sastra, M.Hum.    | Anggota    |  |
| 4.  | Dra. Noviatry, M.Hum.       | Anggota    |  |
| 5.  | Dra. Efri Yades, M.Hum.     | Anggota    |  |

**Diketahui oleh:**

**Ketua Jurusan Sastra Indonesia**



**Dra. Hj. Armini Arbain, M.Hum.**

**NIP 1960 1006 1988 11 20012001**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamiin*, Allah Maha Pemberi Nikmat dan Maha Segalanya. Salawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah yang telah mengantarkan umat-Nya ke pintu kebebasan. Maha besar Allah yang telah memberikan anugrah terindah kepada penulis yaitu penulisan skripsi berjudul **"Analisis Klausa dalam Surat Kabar Harian *Media Indonesia*"** telah selesai dilakukan.

Skripsi ini tidak akan selesai dilakukan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dra. Noviatry, M.Hum., selaku pembimbing I dan Dra. Efri Yades, M.Hum., selaku pembimbing II atas waktu yang disediakan untuk memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis untuk dapat memperoleh gelar sarjana secepatnya dengan nilai yang memuaskan.
2. Ibu Armini Arbain, M.Hum., selaku ketua jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya, atas waktu yang disediakan untuk berdiskusi.
3. Ibu Leni Syafyaha, S.S.,M.Hum., selaku sekretaris Jurusan yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi yang berhubungan dengan jurusan.
4. Para Bapak dan Ibu dosen Jurusan Sastra Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan nasihat kepada penulis.

5. Seluruh pegawai dan staf administrasi Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, atas jasanya.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak M. Idris Dalimunthe dan Ibu S. Hasibuan, atas kasih sayang yang tulus, semangat, dan doa yang mengiringi langkah penulis menuju masa depan yang lebih baik.
7. Abang, kakak, dan adikku, atas sayang, perhatian, kritik, dan saran yang membangun baik dalam keseharian maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Sasindo angkatan 08, Voni, Ai, Sri, Erna, Rice, Surya, Adit, Alvin, Tio, Sandy, Gendi, Tika, Tari, Mega, Melya, Shinta, Rion, Yandi, Syaf, Dara, Afdal, Yori, Dede, Yaman, senior Sasindo 07, dan junior Sasindo angkatan 09, 010, 011, atas persahabatan yang indah.
9. Teman-teman Antropologi angkatan 08, Ipiet, Ade, Ardi, Endah, Akbar, Pia, Rio, Rully, Nedi, Uncu, Helmi sobat KKN, adik-adik kost Uppe, Tia, Iie, yang telah memberikan semangat dan motivasi.
10. Semua pihak, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari pembaca agar mencapai kesempurnaan. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Padang, Juli 2012

Penulis

## ABSTRAK

Dalimunthe, Rismalasari. 2012. "Analisis Klausa dalam Surat Kabar Harian *Media Indonesia*." Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Padang. Pembimbing I: Dra. Noviatry, M. Hum. dan Pembimbing II: Dra. Efri Yades, M. Hum.

Analisis klausa dalam surat kabar harian *Media Indonesia* ini dilatarbelakangi keragaman penggunaan klausa dalam harian *Media Indonesia* yang berpengaruh terhadap fungsi, kategori, dan peran unsur-unsur klausa.

Ada dua masalah penelitian ini, yaitu: (1) apa sajakah jenis-jenis klausa yang digunakan dalam kolom editorial harian *Media Indonesia*, dan (2) Apa sajakah fungsi, kategori, dan peran masing-masing klausa dalam kolom editorial harian *Media Indonesia*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan jenis klausa, dan menjelaskan fungsi, kategori, dan peran unsur klausa yang terdapat pada kolom editorial surat kabar harian *Media Indonesia*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu: (1) tahap penyediaan data, (2) tahap analisis data, (3) tahap penyajian hasil analisis data. Pada tahap penyediaan data digunakan metode simak, dengan teknik sadap sebagai teknik dasar, dan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) dan teknik catat sebagai teknik lanjutan. Pada tahap analisis data digunakan metode agih dan metode padan. Dalam metode agih digunakan Teknik Bagi Unsur Langsung (BUL) sebagai teknik dasar, dan teknik perluas dan teknik ubah ujud sebagai teknik lanjutan. Dalam metode padan digunakan metode padan referensial dengan Teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) sebagai teknik dasar dan Teknik Hubung Banding Membedakan (HBB) sebagai teknik lanjutan. Pada tahap hasil analisis data digunakan metode penyajian informal.

Berdasarkan hasil analisis data, ada tiga jenis klausa yang digunakan dalam surat kabar harian *Media Indonesia* antara lain: (1) berdasarkan struktur internnya, terdiri atas dua sub jenis: klausa lengkap dan klausa tidak lengkap, (2) berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P, terdiri atas dua sub jenis: klausa positif dan klausa negatif, (3) berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi P, terdiri atas dua sub jenis: klausa verbal dan klausa bilangan. Berdasarkan struktur fungsionalnya, ada beberapa fungsi sintaksis yang terdapat dalam kolom editorial harian *Media Indonesia*, yaitu: SP, SPO, SPPel, SPOPel, SPKet, SPOKet, SKetPO, SKet1Ket2, SKet1PKet2, SKet1POKet2, SPKet1Ket2Ket3, SPPelKet1Ket2, SKonjungsiPKet, PPel, POKet, PO, POPel, PPelKet, Ket1SPKet2. Masing-masing klausa diisi oleh kategori kata yang berbeda, yaitu: Fungsi S diisi oleh kategori nomina, frasa nomina, dan pronomina; P diisi oleh kategori verba, frasa verba, dan frasa bilangan; O diisi oleh kategori nomina dan frasa nomina; Pel diisi oleh kategori nomina dan frasa nomina; Ket diisi oleh kategori keterangan, frasa numeral, dan frasa depan. Berdasarkan perannya, masing-masing fungsi memiliki peran-peran tertentu, S berperan sebagai pelaku, penderita, tempat, penerima, penyerta, jumlah, hasil dan sebab; P berperan sebagai perbuatan, keadaan, dan jumlah; O berperan sebagai penderita, penyerta, penerima, dan hasil; Pel berperan sebagai penderita; Ket berperan sebagai waktu, tempat, penerima, dan cara.

## DAFTAR ISI

Halaman

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b> | <b>i</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>        | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>     | <b>v</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang .....                                    | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                   | 7  |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                 | 8  |
| 1.4 Metode dan Teknik Penelitian .....                      | 8  |
| 1.4.1 Metode dan Teknik Penyediaan Data .....               | 8  |
| 1.4.2 Metode dan Teknik Analisis Data .....                 | 9  |
| 1.4.3 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data ..... | 10 |
| 1.5 Populasi dan Sampel .....                               | 11 |
| 1.6 Tinjauan Pustaka .....                                  | 11 |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....                             | 14 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 2.1 Pengantar .....       | 15 |
| 2.2 Sintaksis .....       | 15 |
| 2.3 Kalimat .....         | 16 |
| 2.4 Klausa .....          | 16 |
| 2.5 Analisis Klausa ..... | 20 |
| 2.6 Frasa .....           | 24 |



### **BAB III ANALISIS DATA**

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Pengantar .....                                                                                                 | 26 |
| 3.2 Jenis-jenis Klausa yang Digunakan dalam Kolom Editorial Harian<br>Media Indonesia .....                         | 27 |
| 3.2.1 Jenis Klausa Berdasarkan Struktur Internnya .....                                                             | 27 |
| 3.2.2 Jenis Klausa Berdasarkan Ada Tidaknya Kata Negatif yang<br>Secara Gramatikal Menegatifkan P .....             | 32 |
| 3.2.3 Jenis Klausa Berdasarkan Kategori Kata atau Frase yang<br>Menduduki Fungsi P.....                             | 36 |
| 3.3 Fungsi, Kategori, dan Peran Unsur Klausa yang Terdapat dalam<br>Kolom Editorial Harian Media Indonesia<br>..... | 40 |
| 3.3.1 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Lengkap dan Klausa<br>Tidak Lengkap .....                                  | 40 |
| 3.3.1.1 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Lengkap .....                                                            | 40 |
| 3.3.1.2 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Tidak Lengkap .....                                                      | 47 |
| 3.3.2 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Positif dan Klausa<br>Negatif .....                                        | 50 |
| 3.3.2.1 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Positif .....                                                            | 50 |
| 3.3.2.2 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Negatif .....                                                            | 56 |
| 3.3.3 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Verbal dan Klausa<br>Bilangan .....                                        | 59 |
| 3.3.3.1 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Verbal .....                                                             | 59 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 3.3.3.2 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Bilangan ..... | 64 |
|-----------------------------------------------------------|----|

#### **BAB IV PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan ..... | 65 |
|----------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 4.2 Saran ..... | 66 |
|-----------------|----|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> |  |
|-----------------------------|--|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bahasa telah mengalami perkembangan. Salah satu sarana pengembangan bahasa adalah media. Media merupakan alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 892). Seiring dengan peradaban yang terus bergerak maju, kehadiran media publik baik cetak maupun elektronik telah menjadi sebuah keniscayaan sejarah dan telah dianggap sebagai ikon peradaban masyarakat modern dalam memburu informasi. Untuk mendapatkan berita-berita berharga dan penting, masyarakat tidak harus berduyun-duyun langsung ke tempat kejadian. Hanya dengan membaca dan menyaksikan tayangan berita, masyarakat bisa dengan mudah mengikuti berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Media berfungsi untuk mengumpulkan informasi tentang kenyataan sebagai bahan berita. Bahan berita itu diolah, disunting, yang selanjutnya disajikan sebagai berita. Dalam menyajikan informasi kepada publik, bahasa menjadi media pendukung utama untuk menyampaikan fakta-fakta dan pesan-pesan. Dalam surat kabar misalnya, bahasa digunakan untuk mengungkapkan

berbagai peristiwa menjadi sebuah berita secara tertulis. (artikel Ragam Bahasa Media dalam Perspektif Pembelajaran Bahasa, 2009).

Sebagai sebuah ragam bahasa tulis, bahasa media idealnya harus memenuhi dua syarat utama. Pertama, bahasanya harus terpelihara. Penggunaan bahasa yang terpelihara dengan baik, menjadi sebuah keniscayaan bagi seluruh media sesuai dengan fungsinya sebagai media publik. Media akan dibaca dan dinikmati oleh berbagai kalangan yang beragam, baik dari sisi tingkat usia dan pendidikan, status sosial-ekonomi, budaya, suku, maupun agama. Fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, keterangan, atau hubungan antara fungsi-fungsi itu harus jelas dan nyata. Kaidah-kaidah kebahasaan, seperti penggunaan ejaan, istilah, tanda baca, dan semacamnya sepenuhnya harus diperhatikan dan ditaati. Bahasa media yang terpelihara dengan baik akan diteladani publik secara baik dan benar. Kedua, bahasa media juga harus lebih mudah dipahami karena tugasnya membawa berita, pesan, dan nilai-nilai moral kepada publik. Apa yang disampaikan dalam sebuah media jangan sampai menimbulkan penafsiran ganda yang dapat menggiring dan membangun opini publik secara keliru. Aspek-aspek konstruksi bahasa, seperti kata, frase, klausa, kalimat, atau paragraf hendaknya dipilih secara cermat (artikel Ragam Bahasa Media dalam Perspektif Pembelajaran Bahasa, 2009).

Sehubungan dengan hal di atas, penulis memilih salah satu media cetak sebagai sumber data penelitian, yaitu *Media Indonesia*. Ketertarikan penulis memilih *Media Indonesia* karena media ini merupakan media nasional yang telah

cukup lama terbit, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1970 di Jakarta. Media ini berada di bawah naungan Media Group. Sebagai surat kabar harian, Media Indonesia memiliki posisi yang sama seperti harian Kompas, Republika, harian Tempo dan Jawa Pos. Secara umum kualitas berita yang disajikan harian yang berlogo kepala elang ini tidak kalah dengan media nasional lainnya. Saat ini, Media Indonesia tidak hanya dapat dinikmati lewat media cetak saja namun juga disajikan lewat media online di ([www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)). Penggunaan bahasa pada Media Indonesia ini tentu lebih baik dibandingkan dengan media lokal. Dalam penelitian ini dibutuhkan teks bahasa Indonesia yang baku dan menggambarkan pemakaian bahasa Indonesia sekarang, yaitu bahasa yang mengandung ejaan yang telah disempurnakan (EYD).

Harian *Media Indonesia* memiliki berbagai macam kolom berita. Kolom yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kolom editorial. Editorial (dalam <http://editorial.com.html>) merupakan opini atau pendapat dari redaksi mengenai masalah maupun peristiwa yang sedang terjadi (aktual) yang menghadirkan aspek edukatif dalam arti positif kepada pembacanya. Dalam format surat kabar skala nasional, Media Indonesia tercatat sebagai salah satu dari segelintir surat kabar yang memilih meletakkan kolom editorialnya pada halaman depan. Editorial Media Indonesia paling digemari oleh pembaca dan selalu ditunggu-tunggu. Berbeda dari media nasional lainnya yang lebih mengutamakan berita utama, Media Indonesia justru lebih dicari dengan kolom editorialnya. Kolom editorial memang tidak selalu hadir dengan nama editorial. Masing-masing



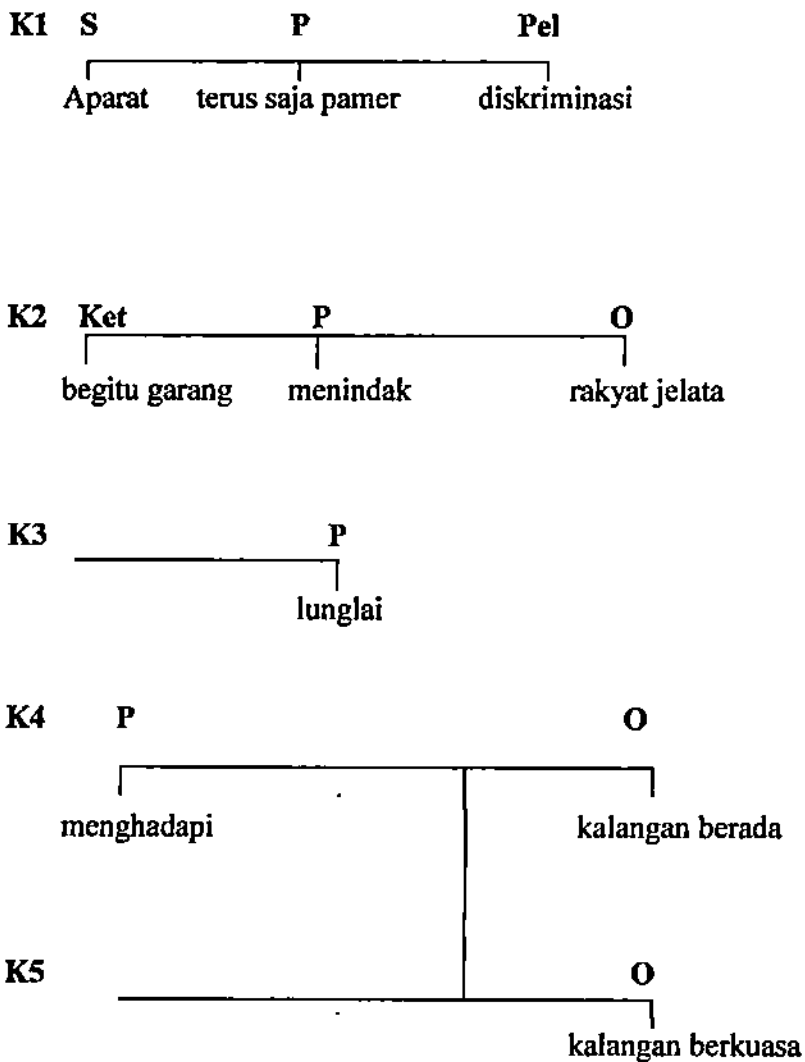
media cenderung memberi nama yang berbeda sebagai ciri khas medianya, misalnya Kompas menyebutnya “Tajuk Rencana”.

Penelitian pada surat kabar harian Media Indonesia masih sangat sedikit dilakukan. Berbeda dengan harian media nasional lainnya seperti Kompas, Tempo, dan Republika yang telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian pada harian Media Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya pada bidang sintaksis dengan objek penelitian frasa. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan objek kajian yang lebih tinggi pada bidang sintaksis yaitu klausa. Penelitian pada bidang sintaksis sangat kurang diminati karena pemahaman konsep fungsi, kategori, dan peran sintaksis cukup rumit serta butuh intuisi kebahasaan yang tinggi.

Pada pengamatan awal, dalam kolom editorial harian Media Indonesia ditemukan adanya keragaman penggunaan klausa dalam kalimat. Keragaman penggunaan klausa tersebut akan berpengaruh terhadap fungsi, kategori, dan peran masing-masing klausa. Klausa dijelaskan sebagai satuan gramatik yang terdiri dari S, P baik disertai O, Pel, dan Ket ataupun tidak (Ramlan, 1987:89). Klausa merupakan unsur yang sebagian besar membangun sebuah kalimat setelah intonasi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik melihat penggunaan bahasa kolom editorial, khususnya keragaman penggunaan klausa serta fungsi kategori, dan peran masing-masing klausa tersebut.

**Berikut adalah contoh penggunaan klausa pada kolom editorial surat kabar harian**

Aparat terus saja pamer diskriminasi, begitu garang menindas rakyat jelata, tetapi lunglai ketika menghadapi kalangan berada dan berkuasa. (sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Rabu 01 Februari 2012, hal 1).



Data di atas merupakan kalimat luas yang terdiri atas lima klausa, yaitu : *aparatus saja pamer diskriminasi (K1), begitu garang menindas rakyat jelata (K2), lunglai (K3), menghadapi kalangan berada (K4), ), menghadapi kalangan berkuasa (K5).*

Berdasarkan struktur internya, klausa 1 (K1) merupakan klausa lengkap karena terdiri dari unsur S, P, Pel; klausa 2 (K2) merupakan klausa tidak lengkap karena hanya terdiri atas unsur Ket, P, O; klausa 3 (K3) merupakan klausa tidak lengkap karena hanya terdiri dari P; klausa 4 (K4) merupakan klausa tidak lengkap karena hanya terdiri atas unsur P, O; klausa 5 (K5) juga merupakan klausa tidak lengkap karena hanya terdiri atas unsur konjungsi P, O. Berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P, klausa 1 (K1), klausa 2 (K2), klausa 3 (K3), klausa 4 (K4), dan klausa (K5) merupakan klausa positif karena tidak memiliki kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P. Berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi P, klausa 1 (K1), klausa 2 (K2), klausa 3 (K3), klausa 4 (K4), dan klausa (K5) merupakan klausa verbal karena predikatnya terdiri dari kata atau frase golongan verbal.

Berdasarkan fungsi, kategori, dan peran tiap-tiap unsur klausa, klausa 1 (K1) terdiri atas fungsi S, P, Pel. Unsur S adalah *aparatus* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran pelaku, unsur P *terus saja pamer* diisi oleh kategori frasa verbal menyatakan peran perbuatan, unsur Pel *diskriminasi* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran penderita. Klausa 2 (K2) terdiri atas fungsi

Ket, P, O. Unsur Ket *begitu garang* diisi oleh kategori adverb menyatakan peran cara, unsur P *menindak* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur O *rakyat jelata* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita. Klausa 3 (K3) terdiri atas fungsi P. Unsur P *lunglai* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan. Klausa 4 (K4) terdiri atas fungsi P, O. Unsur P *menghadapi* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur O *kalangan berada* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran penderita. Klausa 5 (K5) terdiri atas fungsi P, O. Unsur P *menghadapi* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur O *kalangan berkuasa* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran penderita

Dari uraian di atas terlihat keragaman jenis klausa, fungsi, kategori, dan peran masing-masing klausa yang digunakan dalam surat kabar harian *Media Indonesia*. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang analisis klausa dalam kolom editorial surat kabar harian *Media Indonesia*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa sajakah jenis klausa yang digunakan dalam kolom editorial harian *Media Indonesia*?
- b. Apa sajakah fungsi, kategori, dan peran masing-masing klausa yang terdapat dalam kolom editorial harian *Media Indonesia*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan dan menjelaskan jenis klausa yang digunakan pada kolom editorial surat kabar harian Media Indonesia.
- b. Mendeskripsikan dan menjelaskan fungsi, kategori, dan peran masing-masing klausa yang terdapat pada kolom editorial surat kabar harian Media Indonesia.

### **1.4 Metode dan Teknik Penelitian**

Metode dan teknik merupakan konsep yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Metode adalah cara yang harus dilaksanakan dalam sebuah penelitian, sedangkan teknik adalah cara melaksanakan metode tersebut (Sudaryanto, 1993:9).

Sudaryanto (1993:5) mengemukakan bahwa dalam rangka pemecahan masalah penelitian dapat ditempuh dengan tiga tahapan yaitu (1) tahap penyediaan data, (2) tahap analisis data, (3) tahap penyajian hasil analisis data. Setiap tahap penelitian di atas akan dijelaskan dengan menggunakan metode dan teknik sebagai berikut:

#### **1.4.1 Metode dan Teknik Penyediaan Data**

Metode penyediaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak. Metode simak yaitu melakukan penyimakan terhadap

penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993:133). Dalam metode ini terdapat teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasarnya yaitu teknik sadap, untuk mendapatkan datanya peneliti menyadap penggunaan bahasa. Sedangkan teknik lanjutan yang digunakan yaitu Teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC). Peneliti tidak terlibat dalam dialog, konversi, atau suatu proses pembicaraan. Teknik lanjutan yang juga digunakan yaitu teknik catat.

#### 1.4.2 Metode dan Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih dan metode padan beserta dengan teknik-tekniknya. Metode agih yaitu metode yang alat penentunya merupakan bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 1993:15). Metode ini memiliki teknik dasar dan teknik lanjutan. Adapun teknik dasar yang digunakan dalam menganalisis data adalah Teknik Bagi Unsur Langsung (BUL), yaitu membagi satuan lingual data menjadi beberapa bagian atau unsur. Teknik bagi unsur langsung ini penulis terapkan dengan menentukan fungsi, kategori, dan peran yang membentuk unsur kalimat luas dan unsure yang membentuk klausa. Teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik perluas dan teknik ubah ujud. Teknik perluas penulis terapkan untuk mengetahui status kemaknaan pada unsur fungsional tertentu yang membangun klausa. Sama halnya dengan Teknik ubah ujud, teknik ini penulis terapkan juga untuk menentukan satuan makna konstituen

“peran”(seperti pelaku atau agentif, penderita atau objektif, dsb) dan mengetahui pola struktural peran masing masing klausa. Metode padan juga digunakan untuk menganalisis data. Metode padan adalah metode yang alat penentunya berada di luar bahasa, terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993:13). Metode padan yang digunakan adalah metode padan referensial. Metode padan referensial adalah metode analisis data yang alat penentunya adalah kenyataan yang ditunjuk oleh bahasa (referent) itu sendiri. Metode padan terdiri dari dua teknik, yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar dalam penelitian ini adalah Teknik Pilah Unsur Penentu (PUP). Unsur-unsur pembangun klausa, dipilah menurut fungsinya masing-masing. Teknik lanjutan yang digunakan adalah Teknik Hubung Banding Membedakan (HBB). Teknik ini digunakan untuk membedakan antara klausa yang satu dengan klausa yang lain menurut jenisnya pada kolom editorial surat kabar harian *Media Indonesia* dan dari perbedaan itu maka sebuah klausa dapat dikatakan termasuk kategori jenis klausa tertentu. Selain itu juga untuk melihat fungsi, kategori, dan peran antara klausa yang satu dengan klausa yang lain.

#### 1.4.3 Metode Penyajian Hasil Analisis Data

Metode penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penyajian informal. Metode penyajian informal yaitu



memaparkan hasil analisis data dalam bentuk kata-kata biasa. (Sudaryanto, 1993:145).

### **1.5 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah seluruh klausa yang terdapat dalam surat kabar harian Media Indonesia. Data tersebut digali dari sumber tertulis berupa teks dalam kolom Editorial Harian Media Indonesia. Sedangkan sampelnya yaitu klausa yang terdapat pada kolom Editorial Harian Media Indonesia Periode Februari 2012. Alasan penulis mengambil data dalam kurun waktu sebulan karena data yang diperoleh dianggap telah cukup mewakili data yang akan dianalisis.

### **1.6 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan kepustakaan perlu dilakukan untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, tinjauan kepustakaan dilakukan sebagai acuan untuk melihat adanya dugaan pengulangan penelitian. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang telah membahas klausa dengan kajian yang berbeda. Penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Roidah, 1999. Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang yang membahas "Bentuk-bentuk Klausa Iklan Mini dalam Surat Kabar Haluan". Roidah menganalisis bentuk-bentuk klausa pada iklan mini dalam

surat kabar *Haluan*, dan juga melakukan penggantian singkatan tersebut dengan kata dengan tujuan mengungkapkan bentuk klausa yang utuh.

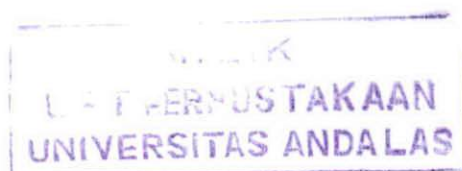
2. Angraini. 2010. Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang yang membahas “Kalimat Majemuk yang Berklausa Relatif dalam Kolom Tajuk Rencana Harian Kompas”. Angraini menganalisis struktur fungsional kalimat majemuk yang berklausa relatif dan struktur fungsional klausa relatif yang digunakan dalam kolom tajuk rencana harian Kompas.
3. Sasdayati, 2010. Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang yang membahas tentang “Klausa pada Teks Iklan Baris dalam Surat Kabar Lokal Sumbar”. Sasdayati menganalisis jenis-jenis dan pola-pola klausa pada teks iklan baris dalam surat kabar lokal Sumbar.
4. Beni Rozhaldi. 2010. Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang yang membahas tentang “Kalimat Luas Brklausa Relatif dalam Teks Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Padang”. Beni Rozhaldi menganalisis fungsi-fungsi sintaksis kalimat dan jenis- jenis klausa kalimat yang berklausa relatif dalam teks warta berita daerah RRI Padang.

Sejauh pengamatan penulis, penelitian yang mengkaji analisis klausa pada kolom editorial harian Media Indonesia yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Secara keseluruhan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, kajiannya sama-sama berupa kajian sintaksis. Akan tetapi jika diperhatikan, penelitian yang penulis lakukan berbeda

dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian Roidah difokuskan pada bentuk klausa iklan mini pada surat kabar *Haluan*. Klausa tersebut terbentuk dari singkatan kata-kata, dan Roidah juga melakukan penggantian singkatan tersebut dengan kata dengan tujuan mengungkapkan bentuk klausa yang utuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Angraini adalah dengan menganalisis struktur fungsional kalimat majemuk yang berklausa relatif, unsur-unsur kalimat majemuk yang diperluas oleh klausa relatif, dan struktur fungsional klausa relatif yang digunakan dalam kolom tajuk rencana harian *kompas*. Penelitian yang dilakukan Sasdayati adalah membahas tentang klausa pada teks iklan baris dalam surat kabar lokal Sumbar. Sasdayati menganalisis jenis-jenis dan pola-pola klausa pada teks iklan baris dalam surat kabar lokal Sumbar.

Penelitian yang dilakukan oleh Beni Rozhaldi adalah menganalisis “Kalimat Luas Berklausa Relatif dalam Teks Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Padang”. Beni Rozhaldi mendeskripsikan fungsi-fungsi sintaksis dan jenis-jenis klausa relatif dalam teks warta berita daerah RRI Padang. Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini lebih difokuskan pada jenis klausa dan analisis klausa, yaitu unsur-unsur (fungsi, kategori, dan peran) yang membangun klausa pada kolom editorial harian *Media Indonesia*. Khusus menganalisis klausa dan jenis klausa belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.



### **1.7 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab I: Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, tinjauan pustaka, sistematika penulisan. Bab II: Landasan teori. Bab III: Analisis data. BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengantar**

Dalam linguistik terdapat empat tataran, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik (Chaer, 2007:18). Berdasarkan tataran linguistik tersebut, analisis objek penelitian ini berada pada tataran sintaksis karena objek penelitian ini berupa klausa. Berikut disajikan teori sintaksis dan lingkupannya dengan objek penelitian.

#### **2.2 Pengertian Sintaksis**

Istilah sintaksis secara langsung diambil dari bahasa Belanda *syntaxis*. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *syntax*. Sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk kalimat, klausa, dan frase (Ramlan, 1987:21). Asal usul kata sintaksis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *sun* yang berarti 'dengan' dan kata *tattein* yang berarti 'menempatkan'. Jadi, secara etimologi istilah itu berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat (Chaer, 2007:206). Pendapat lain mengenai sintaksis disampaikan Tarigan (1986:6), sintaksis sebagai salah satu tata bahasa yang membicarakan struktur-struktur kalimat, klausa, dan frase.

### 2.3 Kalimat

Kridalaksana (2008:103) memberikan batasan kalimat sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Senada dengan definisi kalimat tersebut, Moeliono (1992:245) menyatakan bahwa kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks (wacana) yang mengungkapkan pikiran secara ketatabahasaan.

Alwi, dkk. (2003:336) mengklasifikasikan kalimat atas beberapa golongan, salah satunya berdasarkan jumlah klausanya. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dapat digolongkan atas dua golongan yaitu:

**a. Kalimat tunggal**

Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa.

**b. Kalimat majemuk**

Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih sehingga mempunyai, paling tidak, dua predikat yang tidak dapat dijadikan suatu kesatuan.

### 2.4 Klausa

Menurut Ramlan (1987: 89), klausa adalah satuan gramatik yang terdiri dari S P baik disertai O, PEL, dan KET ataupun tidak. Dengan ringkas, klausa ialah S P (O) (PEL) (K). Tanda kurung menandakan bahwa apa yang terletak dalam kurung itu bersifat manasuka, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada.

Chaer (2007: 231) menyatakan klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen, berupa kata atau frase, yang berfungsi sebagai predikatif, dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan sebagai keterangan. Ahli lain yang mengemukakan batasan klausa yaitu Putrayasa (2007: 11) menyatakan klausa adalah kelompok kata yang terdiri dari satu predikat.

Putrayasa (2007: 14-16) mengklasifikasikan klausa menjadi tiga bagian, yaitu: (1) penggolongan klausa berdasarkan struktur internnya, (2) penggolongan klausa berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P, dan (3) penggolongan klausa berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi P.

#### **2.4.1 Penggolongan Klausa Berdasarkan Struktur Internnya**

Penggolongan klausa berdasarkan struktur internnya terbagi atas klausa lengkap dan klausa tidak lengkap (Putrayasa, 2007:14).

##### **a. Klausa Lengkap**

Klausa lengkap adalah klausa yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur S dan P (Putrayasa, 2007:14). Unsur yang wajib hadir pada klausa lengkap adalah S dan P, sedangkan unsur seperti O, Pel, dan Ket bersifat manasuka. Bersifat manasuka berarti ada boleh dan boleh juga tidak ada.

#### **b. Klausa Tidak Lengkap**

Klausa tidak lengkap adalah klausa yang terdiri dari unsur P, disertai O, PEL, Ket atau tidak (Ramlan, 1987:136). Klausa tidak lengkap unsur yang wajib hadir adalah unsur P, sedangkan unsur O, Pel, Ket bersifat manasuka. Pada klausa tidak lengkap unsur S tidak ada.

#### **2.4.2 Penggolongan Klausa Berdasarkan Ada Tidaknya Kata Negatif yang Secara Gramatikal Menegatifkan P**

Penggolongan klausa berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P terdiri dari klausa positif dan klausa negatif (Putrayasa, 2007:14).

##### **a. Klausa Positif**

Klausa positif ialah klausa yang tidak memiliki kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P. Kata-kata negatif itu adalah *tidak, tak, tiada, tanpa, bukan, belum, dan jangan* (Putrayasa, 2007:14).. Predikat klausa positif terdiri dari kata kerja dan sifat yang tidak memiliki kata negatif yang dapat menegatifkan P-nya.

##### **b. Klausa Negatif**

Klausa negatif adalah klausa yang memiliki kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P (Putrayasa, 2007:14-15).. Seperti yang telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, kata-kata negatif yang dapat



menegatifkan P pada klausa-klausa negatif itu antara lain: *tidak, tak, tiada, tanpa, bukan, belum, dan jangan*.

#### **2.4.3 Penggolongan Klausa Berdasarkan Kategori Kata atau Frase yang Menduduki Fungsi P**

Penggolongan klausa berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi P terdiri dari: klausa nominal, verbal, bilangan, dan depan (Putrayasa, 2007:15).

##### **a. Klausa Nominal**

Klausa nominal adalah klausa yang P-nya terdiri atas kata atau frase golongan N (nominal) (Putrayasa: 2007: 15). Kata golongan N adalah kata-kata yang secara gramatikal mempunyai perilaku yang pada tataran klausa dapat menduduki fungsi S, P, dan O (Ramlan, 1987: 142).

##### **b. Klausa Verbal**

Klausa verbal adalah klausa yang P-nya terdiri atas kata atau frase golongan V (verbal) atau kata kerja (Putrayasa, 2007:15).. Kata golongan V ialah kata yang pada tataran klausa cenderung menduduki fungsi P. Kata verbal dapat digolongkan menjadi beberapa golongan anatara lain: kata kerja, kata sifat, kata kerja transitif, kata kerja intansitif, kata kerja dwitransitif, kata kerja aktif, kata kerja pasif, kata kerja refleksif, dan kata kerja resiprokal.

### c. Klausa Bilangan

Klausa bilangan adalah klausa yang P-nya terdiri atas kata atau frase golongan bilangan. Kata bilangan dapat diikuti kata-kata: *orang, ekor, batang, keping, buah, kodi, helai, kesatu* dan lain sebagainya. Frase bilangan adalah frase yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata bilangan (Putrayasa, 2007:15).

### d. Klausa Depan

Klausa depan adalah klausa yang P-nya terdiri atas frase depan, yaitu frase yang diawali oleh kata depan sebagai penanda. Frase depan ditandai dengan adanya *ke, di, dari, dengan, untuk*, dan lain sebagainya (Putrayasa, 2007:15-16).

## 2.5 Analisis Klausa

Menurut Ramlan (1987: 90-106), klausa dapat dianalisis berdasarkan tiga dasar, yaitu : (1) berdasarkan fungsi unsur-unsurnya, (2) berdasarkan kategori kata atau frase yang menjadi unsurnya, (3) berdasarkan peran unsur-unsurnya.

### 2.5.1 Analisis Klausa Berdasarkan Fungsi Unsur-unsurnya

Klausa terdiri dari unsur-unsur fungsional yang disebut S, P, (O), (Pel), dan (Ket). Kelima unsur itu tidak selalu bersama-sama ada dalam satu klausa. Kadang-kadang satu klausa hanya terdiri dari S dan P, kadang –kadang terdiri dari S, P dan O, kadang-kadang terdiri dari S, P, Pel dan kadang-kadang terdiri

dari S, P, Ket. kadang-kadang terdiri dari S, P, O, dan Ket, kadang-kadang terdiri dari S, P, Pel, Ket, kadang-kadang terdiri dari P saja. Unsur fungsional yang cenderung selalu ada dalam klausa ialah P; unsur-unsur yang lain mungkin ada, mungkin juga tidak ada (Ramlan, 1987: 90).

Putrayasa (2007: 12) memaparkan ciri-ciri unsur fungsional klausa, seperti: Subjek (S), Predikat (P), Objek (O), Pelengkap (Pel), dan Keterangan (K) adalalah sebagai berikut:

a. Subjek (S)

Subjek merupakan sesuatu yang dianggap berdiri sendiri, dan tentangnya diberitakan sesuatu. Ciri-ciri subjek adalah (1) tentangnya diberitakan sesuatu, (2) dibentuk dengan kata benda atau sesuatu yang dibendakan, dan (3) dapat bertanya dengan kata tanya *apa* atau *siapa* dihadapan predikat.

b. Predikat (P)

Predikat merupakan bagian yang memberi keterangan tentang sesuatu yang berdiri sendiri atau subjek itu, biasanya predikat terjadi dari kata kerja atau kata keadaan.

c. Objek (O)

Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Ciri-ciri objek, yaitu : (1) berwujud frasa nominal atau klausa, (2) berada

langsung di belakang predikat, (3) menjadi subjek akibat pemasifan kalimat, dan (4) dapat diganti dengan *pronomina-nya*.

d. Pelengkap (Pel)

Pelengkap berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa ajektival, frasa preposional, atau klausa. Selain itu pelengkap juga memiliki ciri lain, yaitu: (1) berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek dan di belakang objek jika unsur ini hadir, (2) tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat, (3) tidak dapat diganti dengan *-nya* kecuali dalam kombinasi preposisi selain *di, ke, dari, akan*.

e. Keterangan (Ket)

Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Pada umumnya, kehadiran keterangan bersifat manasuka.

## **2.5.2 Analisis Klausa Berdasarkan Kategori Kata atau Frase yang menjadi Unsurnya**

Analisis klausa berdasarkan kategori kata atau frase yang menjadi unsur-unsur klausa ini disebut analisis kategorial. Analisis ini tidak terlepas dari analisis fungsional, bahkan merupakan lanjutan dari analisis fungsional. Unsur kategorial adalah jenis atau kelas kata yang menjadi inti frase (Ramlan, 1987:

98). Unsur kategorial itu adalah frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektif, frasa bilangan, dan frasa depan.

### 2.5.3 Analisis Klausa Berdasarkan Peran Unsur-unsurnya

Unsur peran berkaitan dengan makna gramatikal/ sintaksis. Dengan pengisian unsur peran ini, dapatlah diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Pengisi peran berkaitan dengan makna semantis (Ramlan, 1987: 105).

Selain itu, Ramlan (1987: 107-134) memaparkan bahwa peran atau makna unsur-unsur fungsional, terdiri atas:

- a. Peran (makna unsur) pengisi Subjek (S), menyatakan :  
*pelaku, alat, sebab, penderita, hasil, tempat, penerima, pengalaman, dikenal, dan terjumlah.*
- b. Peran pengisi Predikat (P), menyatakan: *perbuatan, keadaan, keberadaan, pengenalan, jumlah, pemerolehan.*
- c. Peran pengisi objek (O), menyatakan: *penderita, penerima, tempat, alat, hasil.*
- d. Peran pengisi pelengkap (Pel), menyatakan: *penderita, alat.*

- e. Peran pengisi keterangan (K), menyatakan: *tempat, waktu, cara, penerima, peserta, alat, sebab, keseringan perbandingan, perkecualian.*

## 2.6 Frasa

Menurut Ramlan (1987: 151), frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Artinya sebanyak apapun kata tersebut asal tidak melebihi jabatannya sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, atau pun keterangan, maka masih bisa disebut frasa, contoh: *gedung sekolah itu* dan *sakit sekali*.

Lebih lanjut Ramlan (1987) membedakan frasa atas:

- a. Berdasarkan persamaan distribusi dengan unsurnya, frasa dibagi menjadi dua, yaitu: (a) frasa endosentris (kedudukan frasa ini dalam fungsi tertentu dapat digantikan oleh unsurnya), dan (b) frasa eksosentris (frasa yang tidak mempunyai persamaan distribusi dengan unsurnya).
- b. Berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya, frasa dibagi menjadi enam, yaitu: (a) frasa nominal, adalah frasa yang unsur pusatnya berupa kata yang termasuk kategori nomina, (b) frasa verba, adalah frasa yang unsur pusatnya berupa kata yang termasuk kategori verba, (c) frasa ajektiva, adalah frasa yang unsur pusatnya berupa kata yang termasuk kategori adjektiva, (d) frasa numeralia, adalah frasa yang unsur pusatnya

berupa berupa kata yang termasuk numeralia/ bilangan, (e) frasa preposisi, adalah frasa yang ditandai adanya preposisi atau kata depan, dan (f) frasa konjungsi, adalah frasa yang ditandai adanya konjungsi atau kata penghubung.

## **BAB III**

### **ANALISIS DATA**

#### **3.1 Pengantar**

Pada bab ini dilakukan analisis data yang didasarkan pada permasalahan penelitian, yaitu tentang analisis klausa dalam surat kabar harian *Media Indonesia*. Ada dua permasalahan yang dianalisis dalam bab ini, yaitu: 1) jenis-jenis klausa yang digunakan dalam kolom editorial harian *Media Indonesia*, dan 2) fungsi, kategori serta peran masing-masing klausa yang terdapat dalam kolom editorial harian *Media Indonesia*.

Untuk menganalisis data diperlukan teori sebagai tuntunan kerja. Teori yang digunakan adalah teori sintaksis dan semantik peran. Untuk sintaksis digunakan teori yang dikemukakan oleh Ramlan (1987) dan Putrayasa (2007), untuk semantik peran digunakan teori yang dikemukakan oleh Ramlan (1987). Teori sintaksis digunakan untuk menganalisis, jenis klausa, fungsi, dan kategori pengisi unsur masing-masing klausa dalam kolom editorial harian *Media Indonesia*. Teori semantik peran digunakan untuk menganalisis peran pengisi unsur masing-masing klausa dalam kolom editorial harian *Media Indonesia*.



### 3.2 Jenis-jenis Klausa yang Digunakan dalam Kolom Editorial Harian Media

#### Indonesia

Berdasarkan data yang tersedia yang dilanjutkan dengan klasifikasi data, ada tiga jenis klausa yang digunakan dalam kolom editorial *Harian Media Indonesia*, yaitu: klausa berdasarkan struktur internya, klausa berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P, dan klausa berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi P.

#### 3.2.1 Jenis Klausa Berdasarkan Struktur Internnya

Penggunaan klausa pada kolom editorial harian *Media Indonesia* berdasarkan struktur internnya, terdiri atas dua sub jenis, yaitu: klausa lengkap dan klausa tidak lengkap. Klausa lengkap memiliki unsur S dan P, sedangkan klausa tidak lengkap hanya terdiri dari unsur P, disertai O, Ket, Pel. Berikut adalah contoh-penggunaannya:

**Data 1**      November tahun lalu, Aguswandi Tanjung dipenjara enam bulan kurungan karena dituduh mencuri listrik, padahal ia cuma menumpang mengecas ponsel di lobi sebuah apartemen. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Rabu 01 Februari 2012, hal 1*).

Data (1) di atas merupakan kalimat luas yang terdiri atas empat klausa, klausa-klausa tersebut adalah: *november tahun lalu Aguswandi Tanjung dipenjara enam bulan kurungan (K1), dituduh mencuri listrik (K2), ia cuma menumpang di lobi sebuah apartemen (K3), mengecas ponsel di lobi sebuah*

*apartemen* (K4). Klausa (1) dan klausa (3) adalah klausa lengkap terdiri atas unsur Ket1, S, P, Ket2 dan S, P, Ket. Unsur Ket1 pada klausa (1) adalah *november tahun lalu*, unsur S adalah *Aguswandi Tanjung*, unsur P adalah *dipenjara*, unsur Ket2 adalah *enam bulan kurungan*. Unsur S pada klausa (3) adalah *ia*, unsur P adalah *cuma menumpang*, unsur Ket adalah *di lobi sebuah apartemen*. Klausa (2) dan klausa (4) adalah klausa tidak lengkap terdiri dari unsur P, Pel dan P, O, Ket. Unsur P pada klausa (2) adalah *dituduh mencuri*, unsur Pel adalah *listrik*. Unsur P pada klausa (4) adalah *mengecas*, unsur O adalah *ponsel*, unsur Ket adalah *di lobi sebuah apartemen*.

**Data 2**            Pemerintah berwacana melarang kendaraan pribadi roda empat di Jabodetabek mengonsumsi BBM bersubsidi jenis premium. (sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Jumat 03 Februari 2012, hal 1).

Kalimat luas data (2) terdiri atas dua klausa, yaitu: *pemerintah berwacana melarang kendaraan pribadi roda empat di Jabodetabek* (K2), *mengonsumsi BBM bersubsidi jenis premium* (K2). Klausa (1) adalah klausa lengkap terdiri atas unsur S, P, O, Ket. Unsur S pada klausa (1) adalah *pemerintah*, unsur P adalah *berwacana melarang*, unsur O adalah *kendaraan pribadi roda empat*, unsur Ket adalah *di Jabodetabek*. Klausa (2) adalah klausa tidak lengkap terdiri atas unsur P, O. Unsur P pada klausa (2) adalah *mengonsumsi*, unsur O adalah *BBM bersubsidi jenis premium*.

**Data 3** Nyali KPK masih harus dibuktikan untuk menunjukkan kepada publik bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di muka umum. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Sabtu 04 Februari 2012, hal 1*).

Pada data (3) kalimat luas di atas, terdapat dua klausa, yaitu: *nyali KPK masih harus dibuktikan untuk menunjukkan kepada publik* (K1), *setiap orang harus diperlakukan sama di muka umum* (K2). Klausa (1) dan klausa (2) adalah klausa lengkap terdiri atas unsur S, P, Ket dan S, P, Ket. Unsur S pada klausa (1) adalah *nyali KPK*, unsur P adalah *masih harus dibuktikan*, unsur Ket adalah *untuk menunjukkan kepada publik*. Unsur S pada klausa (2) adalah *setiap orang*, unsur P adalah *harus diperlakukan sama*, unsur Ket adalah *di muka umum*..

**Data 4** Indonesia boleh mencontoh negara India yang pemerintahannya menikmati pendapatan lebih setelah memberlakukan biaya rendah dalam berbisnis. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Senin 06 Februari 2012, hal 1*).

Data (4) di atas merupakan kalimat luas yang terdiri atas tiga klausa, yaitu: *Indonesia boleh mencontoh Negara India* (K1), *pemerintahannya menikmati pendapatan lebih* (K2), *memberlakukan biaya rendah dalam berbisnis* (K3). Klausa (1) dan klausa (2) adalah klausa lengkap terdiri atas unsur S, P, O dan S, P, O. Unsur S pada klausa (1) adalah *Indonesia*, unsur P adalah *boleh mencontoh*, unsur O adalah *Negara India*. Unsur S pada klausa (2) adalah *pemerintahannya*, unsur P adalah *menikmati*, unsur O adalah *pendapatan lebih*. Klausa (3) adalah klausa tidak lengkap terdiri atas unsur P, Pel, Ket. Unsur P

adalah *memberlakukan*, unsur Pel adalah *biaya rendah*, unsur Ket adalah *dalam berbisnis*.

**Data 5** Dalam konferensi pers di Cikeas, Bogor, Minggu (5/2), Yudhoyono dengan tegas menyatakan sangat menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK terkait dengan kasus Wisma Atlet. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Selasa 07 Februari 2012, hal 1*).

Kalimat luas data (5) terdiri atas dua klausa, yaitu: *Yudhoyono dengan tegas menyatakan sangat menghormati proses hukum* (K1), *tengah dilakukan KPK terkait dengan kasus Wisma Atlet* (K2). Klausa (1) adalah klausa lengkap terdiri atas unsur S, Ket, P O. Unsur S adalah *Yudhoyono*, unsur Ket adalah *dengan tegas menyatakan*, unsur P adalah *sangat menghormati*, unsur O adalah *proses hukum*. Klausa (2) adalah klausa tidak lengkap terdiri atas unsur P, Ket. Unsur P adalah *tengah dilakukan KPK*, unsur Ket adalah *terkait dengan kasus Wisma Atlet*.

**Data 6** Di tengah perlambatan yang terjadi di sejumlah Negara, perekonomian Indonesia ternyata mampu tumbuh 6,5% pada 2011. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Kamis 09 Februari 2012, hal 1*).

Data (6) di atas terdiri atas satu klausa, yaitu: *perlambatan yang terjadi di sejumlah Negara perekonomian Indonesia ternyata mampu tumbuh 6,5 % pada 2011* (K1). Klausa di atas adalah klausa lengkap terdiri atas unsur Ket1 S P Ket.

Unsur Ket adalah *di tengah perlambatan yang terjadi di sejumlah Negara*, unsur S adalah *perekonomian Indonesia*, unsur P adalah *mampu tumbuh 6,5 %* unsur Ket2 adalah *pada 2011*.

**Data 7** Kabar penemuan benda purbakala mirip piramida di sejumlah kawasan di Indonesia menimbulkan kehebohan sekaligus mengundang perdebatan. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Sabtu 11 Februari 2012, hal 1*).

Kalimat luas data (7) terdiri atas dua klausa, yaitu: *kabar penemuan benda purbakala mirip piramida di sejumlah kawasan di Indonesia menimbulkan kehebohan* (K1), *mengundang perdebatan* (K2). Klausa (1) adalah klausa lengkap terdiri atas unsur S, Ket, P, O. Unsur S adalah *kabar penemuan benda purbakala mirip piramida*, unsur Ket adalah *di sejumlah kawasan di Indonesia*, unsur P adalah *menimbulkan*, unsur O adalah *kehebohan*. Klausa (2) adalah klausa tidak lengkap terdiri atas unsur P, O. Unsur P pada klausa 2 adalah *mengundang*, unsur O adalah *perdebatan*.

**Data 8** KPK gesit menetapkan Wa Ode, yang mengungkap kebusukan para koleganya, menjadi tersangka. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Kamis 16 Februari 2012, hal 1*).

Data (8) di atas merupakan kalimat luas yang terdiri atas dua klausa, yaitu: *KPK gesit menetapkan Wa Ode menjadi tersangka* (K1), *mengungkap kebusukan para koleganya menjadi tersangka* (K2). Klausa (1) adalah klausa

lengkap terdiri atas unsur S, P, O Pel. Unsur S adalah *KPK*, unsur P adalah *gesit menetapkan*, unsur O adalah *Wa Ode*, unsur Pel adalah *menjadi tersangka*. Klausa (2) adalah klausa tidak lengkap terdiri atas unsur P, O, Pel. Unsur P adalah *mengungkap*, unsur O adalah *kebusukan para koleganya*, unsur Pel adalah *menjadi tersangka*.

### 3.2.2 Jenis Klausa Berdasarkan Ada Tidaknya Kata Negatif yang Secara

#### Gramatikal Menegatifkan P

Klausa yang digunakan dalam kolom editorial harian *Media Indonesia* berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P, terdapat dua sub jenis klausa, yaitu: klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif merupakan klausa yang tidak memiliki kata negatif *tak, tidak, bukan, dan tanpa* yang dapat menegatifkan P-nya. Sebaliknya klausa negatif merupakan klausa yang memiliki kata negatif *tak, tidak, bukan, dan tanpa* yang dapat menegatifkan P-nya. Berikut adalah contoh-contoh klausa tersebut beserta uraiannya.

**Data 9** Sampah jahat yang dilarang dibuang di banyak Negara diterima dengan senyum di Indonesia. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Kamis 02 Februari 2012, hal 1*).

Kalimat luas data (9) terdiri atas dua klausa, yaitu: *sampah jahat yang dilarang dibuang di banyak negara* (K1), *diterima dengan senyum di Indonesia* (K2). Klausa (1) dan klausa (2) masing-masingnya klausa positif. Pada klausa

tersebut tidak terdapat kata negatif yang dapat menegatifkan P-nya. Unsur P pada klausa (1) dan klausa (2) adalah *dilarang dibuang* dan *diterima*.

**Data 10** Rakyat tanpa ampun memberi sanksi kepada partai Demokrat yang tidak konsisten antikorupsi. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Rabu 08 Februari 2012, hal 1*).

Data (10) di atas merupakan kalimat luas yang terdiri atas dua klausa, yaitu: *rakyat tanpa ampun memberi sanksi kepada partai Demokrat* (K1), *tidak konsisten antikorupsi* (K2). Klausa (1) dan klausa (2) masing-masingnya klausa negatif. Predikat klausa (1) dan klausa (2) adalah *tanpa* dan *tidak konsisten*. Kata *tanpa* dan *tidak* pada klausa negatif ini dapat menegatifkan kata *memberi* dan *konsisten*.

**Data 11** Julukan sebagai lumbung pangan yang disematkan pada negeri ini juga tidak menggaransi Indonesia terbebas dari krisis pangan. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Jumat 10 Februari 2012, hal 1*).

Pada data (11) kolom editorial, terdapat dua klausa, yaitu: *julukan sebagai lumbung pangan yang disematkan pada negeri ini* (K1), *tidak menggaransi Indonesia terbebas dari krisis pangan* (K2). Klausa (1) adalah klausa positif karena tidak ditandai kata negatif yang dapat menegatifkan P-nya. Predikat dari klausa (1) adalah *disematkan*. Klausa (2) adalah klausa negatif. Kata negatif pada klausa (2) adalah kata *tidak*. Kata *tidak* tersebut dapat

menegatifkan kata *menggaransi*, predikat dari klausa (2) adalah *tidak menggaransi*.

**Data 12** Pemberantasan korupsi terasa sulit dan tidak signifikan lantaran lebih banyak diucapkan daripada direalisasikan. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Rabu 15 Februari 2012, hal 1*).

Kalimat luas data (12) terdiri atas dua klausa, klausa-klausa tersebut adalah: *Pemberantasan korupsi terasa sulit* (K1), *tidak signifikan lantaran lebih banyak diucapkan daripada direalisasikan* (K2). Klausa (1) adalah klausa positif. Pada klausa tersebut tidak terdapat kata negatif yang dapat menegatifkan P-nya. Unsur P pada klausa (1) adalah *terasa sulit*. Klausa (2) adalah klausa negatif. Predikat klausa (2) adalah *tidak signifikan*. Kata *tidak* pada klausa negatif ini dapat menegatifkan kata *signifikan*.

**Data 13** Narapidana maupun tahanan bisa leluasa keluar-masuk rumah tahanan dengan membayar upeti kepada petugas. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Selasa 14 Februari 2012, hal 1*).

Pada data 13 kolom editorial, terdapat dua klausa, yaitu *narapidana bisa leluasa keluar masuk rumah tahanan dengan membayar upeti kepada petugas* (K1), *tahanan bisa leluasa keluar masuk rumah tahanan dengan membayar upeti kepada petugas* (K2). Klausa (1) dan klausa (2) adalah klausa positif. Klausa positif ini tidak ditandai kata negatif yang dapat menegatifkan P-nya. Predikat dari klausa (1) dan klausa (2) adalah *bisa leluasa keluar masuk*.



**Data 14** Mahkamah Agung pada senin (13/2) menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Jumat 17 Februari 2012, hal 1*).

Data (14) di atas merupakan kalimat luas yang terdiri atas dua klausa, yaitu: *Mahkamah Agung pada senin (13/2) menolak permohonan peninjauan kembali (K1), diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu (K2)*. Klausa di atas adalah klausa positif. Pada klausa tersebut tidak terdapat kata negatif yang dapat menegatifkan P-nya. Unsur P pada klausa 1 dan klausa 2 adalah *menolak permohonan peninjauan kembali dan diajukan*.

**Data 15** Bagi Angelina, menutup-nutupi fakta hanya akan menambah daftar ancaman hukuman. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Sabtu 18 Februari 2012, hal 1*).

Kalimat luas data (15) terdiri atas dua klausa, yaitu: *Angelina menutup-nutupi fakta (K1), hanya akan menambah daftar ancaman hukuman (K2)*. Klausa di atas adalah klausa positif. Klausa positif ini tidak ditandai kata negatif yang dapat menegatifkan P-nya. Predikat dari klausa 1 dan klausa 2 adalah *menutup-nutupi fakta dan hanya akan menambah*.

**Data 16** Ketika kasus korupsi Wisma Atlet yang melibatkan sejumlah kader Partai Demokrat mencuat, publik berharap Yudhoyono menyelesaikan masalah itu. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Senin 20 Februari 2012, hal 1*).

Pada data (16) kolom editorial, terdapat empat klausa, klausa-klausa tersebut adalah : *kasus korupsi Wisma Atlet melibatkan sejumlah kader Partai Demokrat mencuat (K1), kasus korupsi Wisma Atlet mencuat (K2), publik berharap (K3), Yudhoyono menyelesaikan masalah itu (K4)*. Klausa di atas adalah klausa positif. Pada klausa tersebut tidak terdapat kata negatif yang dapat menegatifkan P-nya. Unsur P pada klausa 1, 2, 3 dan 3 adalah *melibatkan, mencuat, berharap, dan menyelesaikan*.

### 3.2.3 Jenis Klausa Berdasarkan Kategori Kata atau Frase yang Menduduki

#### Fungsi P

Penggunaan klausa pada kolom editorial harian *Media Indonesia* berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi P, terdapat dua jenis klausa, yaitu: klausa verbal dan klausa bilangan. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frase golongan verbal atau kata kerja; klausa bilangan adalah klausa yang predikatnya terdiri atas kata atau frase golongan bilangan; klausa nominal adalah klausa yang predikatnya terdiri atas kata atau frase golongan nominal. Berikut adalah contoh penggunaannya:

**Data 17**      Negeri ini terlampau sedikit menyimpan hal-hal baik untuk dijadikan panduan sehingga, untuk hal sepele pun, kita harus belajar dari luar negeri. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Selasa 21 Februari 2012, hal 1*).

Pada data (17) kolom editorial, terdapat dua klausa, yaitu *negeri ini terlampau sedikit menyimpan hal-hal baik untuk dijadikan panduan (K1), untuk hal sepele pun kita harus belajar dari luar negeri (K2)*. Klausa di atas adalah klausa verbal. Predikat klausa-klausa tersebut termasuk golongan kata kerja. Predikat klausa di atas adalah frase *terlampau sedikit menyimpan dan harus belajar*.

**Data 18**      Meski aroma bau busuk korupsi sudah lama tercium, sejauh ini baru dua anggota banggar yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Rabu 22 Februari 2012, hal 1*).

Data (18) di atas merupakan kalimat luas yang terdiri atas dua klausa, yaitu: *aroma bau busuk korupsi sudah lama tercium (K1), baru dua anggota banggar yang ditetapkan KPK sebagai tersangka (K2)*. Klausa (1) dan klausa (2) adalah klausa verbal yang predikatnya tergolong kata kerja. Unsur P pada klausa (1) dan klausa 2 adalah *sudah lama tercium dan ditetapkan KPK*.

**Data 19**      Saksi dan terdakwa kasus korupsi dengan enteng melontarkan jurus tidak tahu, tidak ingat, tidak kenal, dan lupa untuk menghindar dari jeratan hukum. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Kamis 23 Februari 2012, hal 1*).

Kalimat luas data (19) kolom editorial, terdiri atas dua klausa, yaitu *saksi kasus korupsi dengan enteng melontarkan jurus tidak tahu, tidak ingat, tidak kenal, dan lupa untuk menghindar dari jeratan hukum (K2), terdakwa. kasus*

*korupsi dengan enteng melontarkan jurus tidak tahu, tidak ingat, tidak kenal, dan lupa untuk menghindar dari jeratan hukum.* Klausa di atas adalah klausa verbal yang predikatnya tergolong kata kerja. Unsur P dari klausa 1 dan klausa 2 adalah *melontarkan*..

**Data 20** Dalam pasal itu disebutkan bahwa pengendalian anggaran subsidi BBM 2012 akan dilakukan melalui pengalokasian yang lebih tepat sasaran. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Jumat 24 Februari 2012, hal 1*).

Kalimat luas data (20) terdiri atas dua klausa, yaitu: *dalam pasal itu disebutkan (K1), pengendalian anggaran subsidi BBM 2012 akan dilakukan melalui pengalokasian yang lebih tepat sasaran (K2).* Klausa di atas adalah klausa verba. Predikat klausa-klausa tersebut termasuk golongan kata kerja. Predikat klausa-klausa di atas adalah *disebutkan* dan *akan dilakukan*.

**Data 21** Tiga narapidana harus ditembak karena menyerang polisi dengan batu batako. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Sabtu 25 Februari 2012, hal 1*).

Pada data (21) kolom editorial, terdapat dua klausa, yaitu: *tiga narapidana harus ditembak (K1), menyerang polisi dengan batu batako (K2).* Klausa di atas adalah klausa verbal. Predikat klausa-klausa tersebut termasuk golongan kata kerja. Unsur P pada klausa (1) dan klausa (2) adalah *harus ditembak* dan *menyerang*.

**Data 22** Premanisme semakin garang memantik kecemasan dan menghadirkan ketakutan di ruang publik. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Senin 27 Februari 2012, hal 1*).

Data (22) di atas merupakan kalimat luas yang terdiri atas tiga klausa, yaitu: *premanisme semakin garang* (K1), *memantik kecemasan* (K2), *menghadirkan ketakutan di ruang publik* (K2). Klausa-klausa di atas adalah klausa verbal. Predikat klausa-kausa tersebut tergolong kata kerja. Predikat klausa-kausa di atas adalah *semakin garang*, *memantik kecemasan* dan *menghadirkan ketakutan*.

**Data 23** Jaksa menuntut ringan dan hakim pun memvonis koruptor sangat ringan sehingga tidak pernah ada efek jera. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Selasa 28 Februari 2012, hal 1*).

Kalimat luas data (23) terdiri atas dua klausa yaitu: *jaksa menuntut ringan* (K1), *hakim memvonis koruptor sangat ringan* (K2). Klausa 1 dan klausa 2 adalah klausa verbal yang predikatnya tergolong kata kerja. Unsur P pada klausa 1 dan klausa 2 adalah *menuntut* dan *memvonis*.

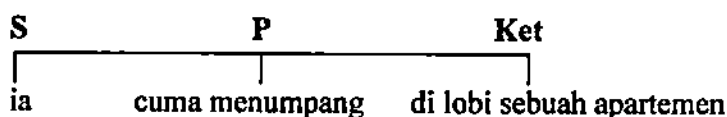
**Data 24** Jumlah anggota Badan Anggaran DPR cuma 86 orang dari 560 anggota dewan. (*sumber: Kolom Editorial Media Indonesia, Selasa 22 Februari 2012, hal 1*).

Data (24) kolom editorial terdiri atas satu klausa, yaitu: *jumlah anggota Badan Anggaran DPR cuma 86 orang dari 560 anggota dewan* (K1). Klausa



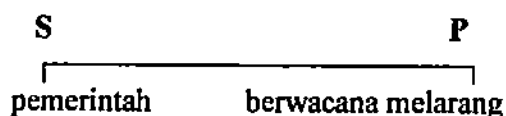
Fungsi sintaksis klausa lengkap di atas adalah Ket1 S P Ket2. Unsur ket1 adalah *november tahun lalu* diisi oleh kategori keterangan menyatakan peran waktu, unsur S adalah *Aguswandi Tanjung* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita, unsur P adalah *dipenjara* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, dan unsur Ket2 adalah *enam bulan kurungan* diisi oleh kategori frasa numeral menyatakan peran waktu.

#### Klausa Lengkap 2 (dari Data 1)



Klausa lengkap (2) memiliki fungsi sintaksis S P Ket. Unsur S adalah *ia* diisi oleh kategori pronomina menyatakan peran pelaku, unsur P adalah *cuma menumpang* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan, unsur Ket adalah *di lobi sebuah apartemen* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran tempat.

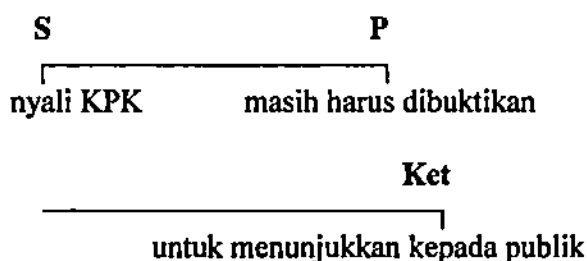
#### Klausa Lengkap 3 (dari Data 2)





Klausa lengkap (3) memiliki fungsi sintaksis S P O Ket. Unsur S adalah *pemerintah* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran pelaku, unsur P adalah *berwacana melarang* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan, unsur O adalah *kendaraan pribadi roda empat* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita, unsur Ket adalah *di Jabodetabek* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran tempat.

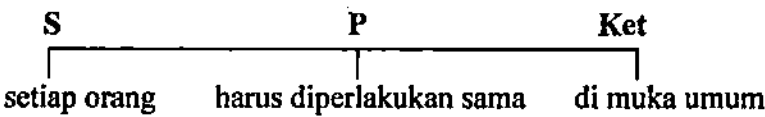
#### Klausa Lengkap 4 (dari Data 3)



Fungsi sintaksis klausa lengkap di atas adalah S P Ket. Unsur S adalah *nyali KPK* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita, unsur P adalah *masih harus dibuktikan* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan, unsur Ket adalah *untuk menunjukkan kepada publik* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran penerima.

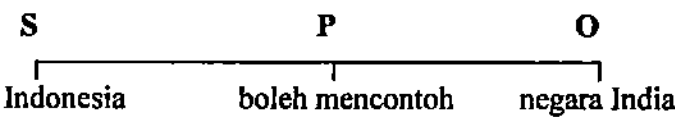


**Klausa Lengkap 5 (dari Data 3)**



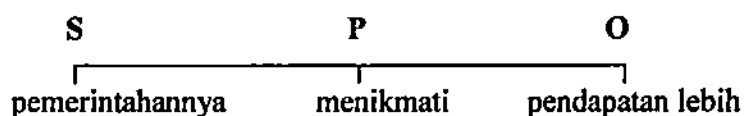
Fungsi sintaksis klausa lengkap di atas adalah S P Ket. Unsur S adalah *setiap orang* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penerima, unsur P *harus diperlakukan sama* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan, unsur Ket *di muka umum* diisi oleh frasa depan menyatakan peran tempat.

**Klausa Lengkap 6 (dari Data 4)**



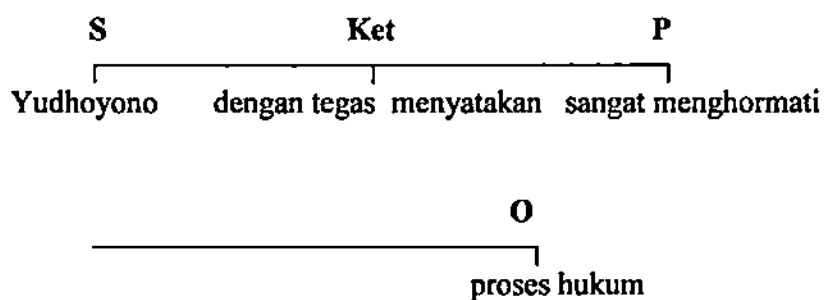
Klausa lengkap (6) memiliki fungsi sintaksis S P O. Unsur S adalah *Indonesia* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran tempat, unsur P adalah *boleh mencontoh* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan, unsur O *negara India* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran sasaran.

#### Klausa Lengkap 7 (dari Data 4)



Fungsi sintaksis klausa lengkap di atas adalah S P O. Unsur S adalah *pemerintahannya* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran penerima, unsur P adalah *menikmati* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur O adalah *pendapatan lebih* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita.

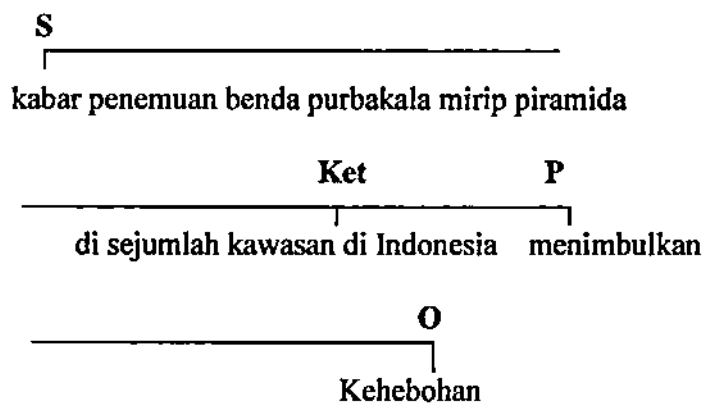
#### Klausa Lengkap 8 (dari Data 5)



Klausa lengkap (8) memiliki fungsi sintaksis S Ket P O. Unsur S adalah *Yudhoyono* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran pelaku, unsur Ket

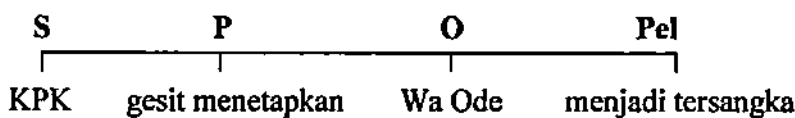


**Klausa Lengkap 10 (dari Data 7)**



Klausa lengkap (10) memiliki fungsi sintaksis S Ket P O. Unsur S adalah *kabar penemuan benda purbakala mirip piramida* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran sebab, unsur Ket adalah *di sejumlah kawasan di Indonesia* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran tempat, unsur P adalah *menimbulkan* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur O adalah *kehebohan* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran hasil.

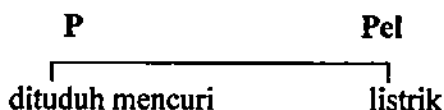
**Klausa Lengkap 11 (dari Data 8)**



Klausa lengkap (11) memiliki fungsi sintaksis S P O Pel. Unsur S adalah *KPK* diisi oleh kategori nomina memiliki peran pelaku, unsur P *gesit menetapkan* diisi oleh kategori frasa verba memiliki peran perbuatan, unsur O *Wa Ode* diisi oleh kategori nomina memiliki peran penderita, unsur Pel *menjadi tersangka* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita.

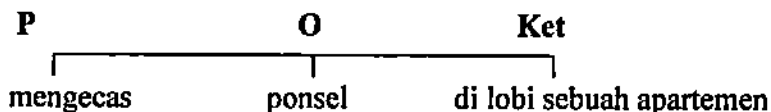
### 3.3.1.2 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Tidak Lengkap

#### Klausa Tidak Lengkap 1 (dari Data 1)



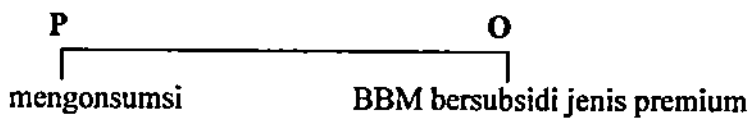
Klausa tidak lengkap (1) memiliki fungsi sintaksis P Pel. Unsur P *dituduh mencuri* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan, unsur Pel *(listrik)* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran penderita.

#### Klausa Tidak Lengkap 2 (dari Data 1)



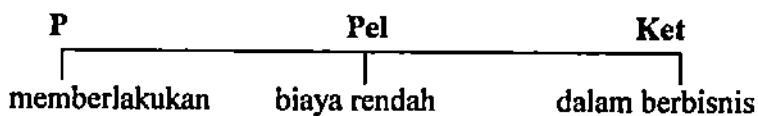
Klausa tidak lengkap (2) memiliki fungsi sintaksis P O Ket. Unsur P adalah *mengecas* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur O adalah *ponsel* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran penderita, unsur Ket adalah *di lobi sebuah apartemen* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran tempat.

### Klausa Tidak Lengkap 3 (dari Data 2)



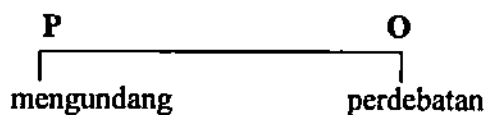
Fungsi sintaksis klausa tidak lengkap di atas adalah P O. Unsur P adalah *mengonsumsi* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur O adalah *BBM bersubsidi jenis premium* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penyerta.

### Klausa Tidak Lengkap 4 (dari Data 4)



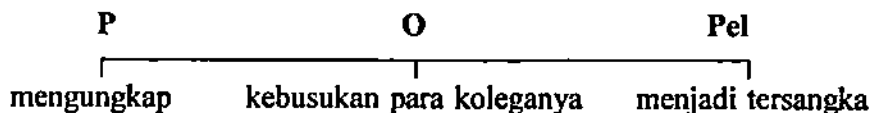
Fungsi sintaksis klausa di atas adalah P Pel Ket. Unsur P adalah *memberlakukan* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur Pel adalah *biaya rendah* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita, unsur Ket adalah *dalam berbisnis* diisi oleh kategori keterangan menyatakan peran tempat.

#### Klausa Tidak Lengkap 5 (dari Data 7)



Fungsi sintaksis klausa di atas adalah P O. Unsur P adalah *mengundang* diisi oleh kategori verba menyatakan perbuatan, unsur O adalah *perdebatan* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran hasil.

#### Klausa Tidak Lengkap 6 (dari Data 8)



Fungsi sintaksis klausa di atas adalah P O Pel. Unsur P adalah *mengungkap* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur O

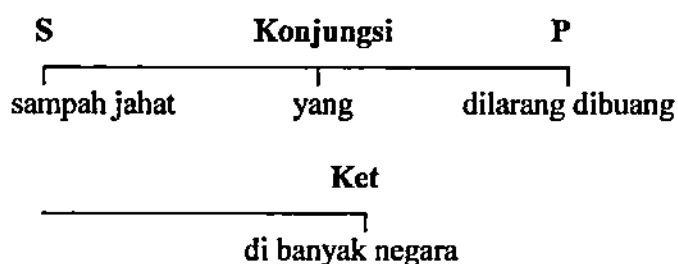
*kebusukan para koleganya* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penerima, unsur *Pel* diisi oleh kategori *menjadi tersangka* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita.

### 3.3.2 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Positif dan Klausa Negatif

Pada kolom editorial harian *Media Indonesia* terdapat fungsi, kategori, dan peran unsur klausa positif dan klausa negatif sebagai berikut:

#### 3.3.2.1 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Positif

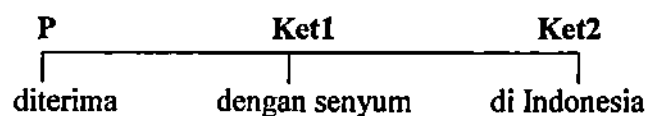
##### Klausa Positif 1 (dari Data 9)



Klausa positif (1) memiliki fungsi sintaksis S (Konjungsi) P Ket. Unsur S adalah *sampah jahat* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita, unsur *yang* berfungsi sebagai konjungsi, unsur P *dilarang dibuang* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan, unsur Ket adalah *di banyak negara* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran tempat.

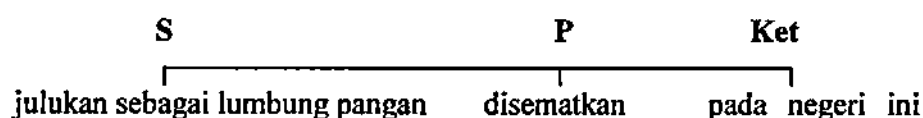


### Klausa Positif 2 (dari Data 9)



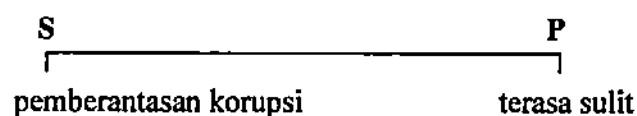
Klausa positif (2) memiliki fungsi sintaksis P Ket1 Ket2. Unsur P adalah *diterima* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur Ket1 *dengan senyum* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran cara, unsur Ket2 *di Indonesia* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran tempat.

### Klausa Positif 3 (dari Data 11)



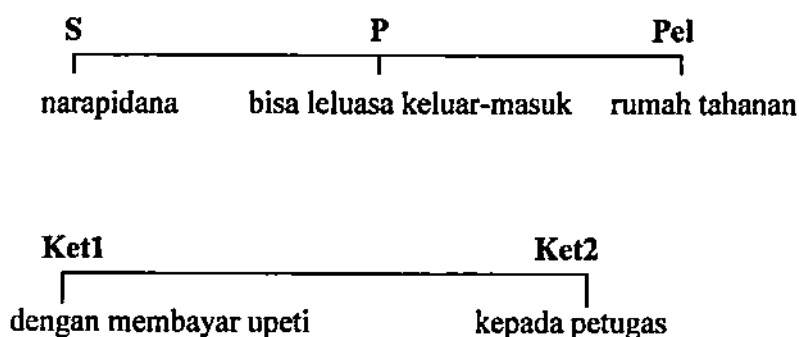
Klausa positif (3) memiliki fungsi sintaksis S P Ket. Unsur S adalah *julukan sebagai lumbung pangan* diisi oleh kategori frasa nomina memiliki peran penerima, unsur P *disematkan* diisi oleh kategori verba memiliki peran perbuatan, unsur Ket *pada negeri ini* diisi oleh kategori frasa depan memiliki peran tempat.

#### Klausa Positif 4 (dari Data 12)



Fungsi sintaksis klausa di atas adalah S P. Unsur S *pemberantasan korupsi* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran sasaran, unsur P *terasa sulit* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan.

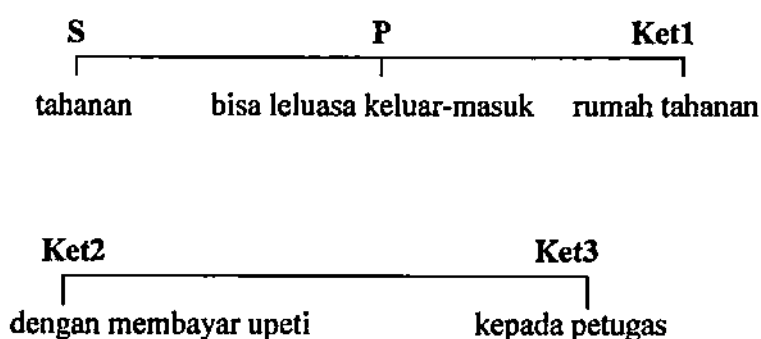
### Klausa Positif 5 (dari Data 13)



Fungsi sintaksis klausa di atas adalah S P Pel Ket1 Ket2. Unsur S adalah *narapidana* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran pelaku, unsur P *bisa leluasa keluar masuk* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan, unsur Pel *rumah tahanan* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita, unsur Ket1 *dengan membayar upeti* diisi oleh kategori frasa

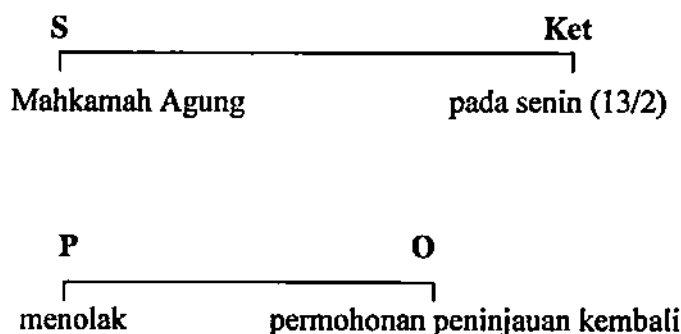
depan menyatakan peran cara, unsur Ket2 *kepada petugas* diisi oleh kategori  
frasa depan menyatakan peran penerima.

**Klausa Positif 6 (dari Data 13)**



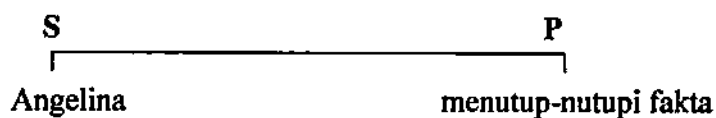
Klausa positif (6) memiliki fungsi sintaksis S P Ket1 Ket2 Ket3. Unsur S adalah *tahanan* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran pelaku, unsur P *bisa leluasa keluar masuk* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan, unsur Ket1 *rumah tahanan* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran tempat, unsur Ket2 *dengan membayar upeti* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran cara, unsur Ket3 *kepada petugas* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran penerima.

**Klausa Positif 7 (dari Data 14)**



Klausa positif (7) memiliki fungsi sintaksis S Ket P O. Unsur S adalah *Mahkamah Agung* diisi oleh kategori frasa nomina memiliki peran pelaku, unsur Ket *pada senin (13/2)* diisi oleh kategori frasa depan memiliki peran waktu, unsur P *menolak* diisi oleh kategori verba memiliki peran perbuatan, unsur O adalah *permohonan peninjauan kembali* diisi oleh frasa nomina memiliki peran penderita.

**Klausa Positif 8 (dari Data 15)**



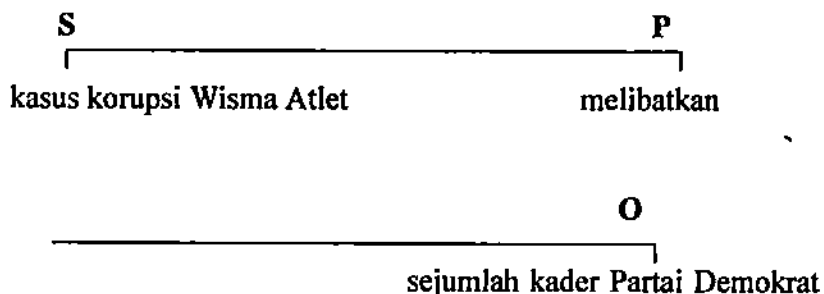
Fungsi sintaksis klausa di atas adalah S P. Unsur S adalah *Angelina* diisi oleh kategori nomina memiliki peran pelaku, unsur P *menutup-nutupi fakta* diisi oleh kategori frasa verba memiliki peran perbuatan.

**Klausa Positif 9 (dari Data 15)**



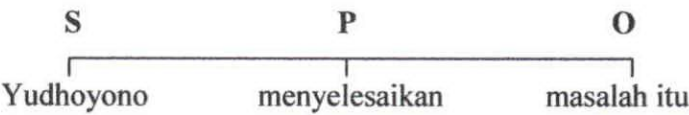
Klausa positif (9) memiliki fungsi sintaksis S P O. Unsur S adalah *Angelina* diisi oleh kategori nomina memiliki peran pelaku, unsur P adalah *hanya akan menambah* diisi oleh kategori frasa verba memiliki peran perbuatan, unsur O *daftar ancaman hukuman* diisi oleh kategori frasa nomina memiliki peran penderita.

### Klausur Positif 10 (dari Data 16)



Fungsi sintaksis klausa di atas adalah S P O. Unsur S *kasus korupsi Wisma Atlet* diisi oleh kategori frasa nomina memiliki peran pelaku, unsur P *melibatkan* diisi oleh kategori frasa verba memiliki peran perbuatan, unsur O *sejumlah kader Partai Demokrat* diisi oleh kategori frasa nomina memiliki peran penderita.

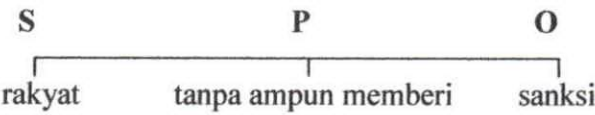
**Klausa Positif 11 (dari Data 16)**

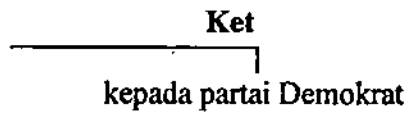


Klausa positif (11) memiliki fungsi sintaksis S P O. Unsur S adalah *Yudhoyono* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran pelaku, unsur P adalah *menyelesaikan* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur O adalah *masalah itu* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita.

**3.3.2.2 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Negatif**

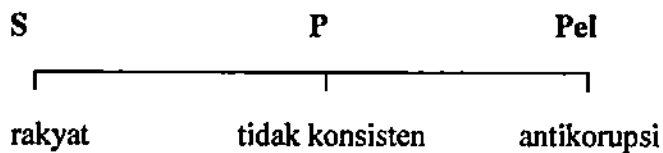
**Klausa Negatif 1 (dari Data 10)**





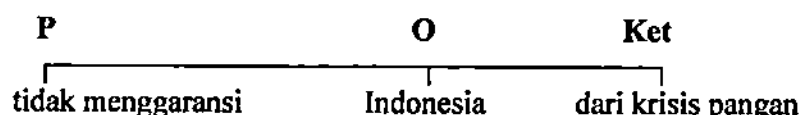
Fungsi sintaksis klausa di atas adalah S P O Ket. Unsur S pada klausa 1 adalah *rakyat* diisi oleh kategori nominal memiliki peran pelaku, unsur P adalah *tanpa ampun memberi* diisi oleh kategori frasa verba memiliki peran perbuatan, unsur O adalah *sanksi* diisi oleh kategori nomina memiliki peran penerima, unsur Ket adalah *kepada partai Demokrat* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran penerima.

#### Klausa Negatif 2 (dari Data 10)



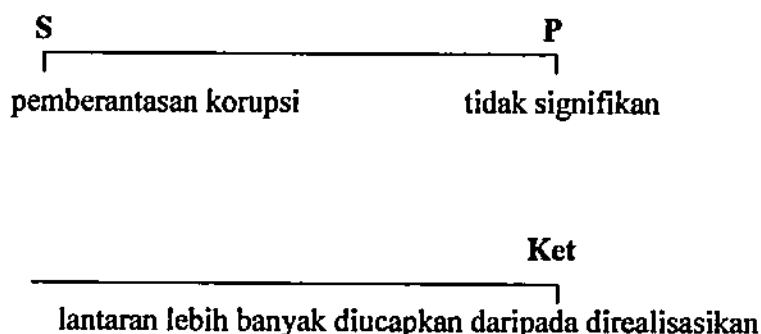
Klausa negatif (2) memiliki fungsi sintaksis S P Pel. Unsur S adalah *rakyat* diisi oleh kategori nomina memiliki peran pelaku, unsur P adalah *tidak konsisten* diisi oleh kategori frasa verba memiliki peran perbuatan, unsur Pel adalah *antikorupsi* diisi oleh kategori frasa nomina memiliki peran penderita.

### Klausa Negatif 3 (dari Data 11)



Fungsi sintaksis klausa di atas adalah P O Ket. Unsur P adalah *tidak menggaransi* diisi oleh kategori frasa verba memiliki peran perbuatan, unsur O *Indonesia* diisi oleh kategori nomina memiliki peran tempat, unsur Ket *dari krisis pangan* diisi oleh kategori frasa depan memiliki peran waktu.

### Klausa Negatif 4 (dari Data 12)



Klausa negatif (4) memiliki fungsi sintaksis S P Ket. Unsur S adalah *pemberantasan korupsi* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran sebab, unsur P adalah *tidak signifikan* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran menyatakan keadaan, unsur Ket adalah *lantaran lebih banyak diucapkan*



*daripada direalisasikan* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbandingan.

**3.3.3 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Verbal dan Klausa Bilangan**

Pada kolom editorial harian *Media Indonesia* terdapat fungsi, kategori, dan peran tiap-tiap unsur klausa verbal dan klausa bilangan sebagai berikut:

**3.3.3.1 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Verbal**

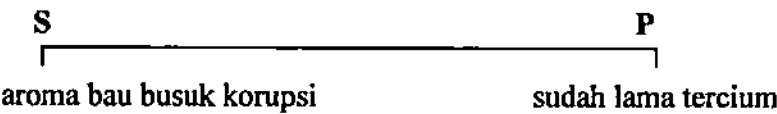
**Klausa Verbal 1 (dari Data 17)**



Fungsi sintaksis klausa di atas adalah S Ket1 P O Ket2. Unsur S adalah *negeri ini* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran tempat, unsur Ket *terlampau sedikit* diisi oleh kategori adverb menyatakan peran cara, unsur P *menyimpan* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan, unsur O *hal-hal baik* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita, unsur

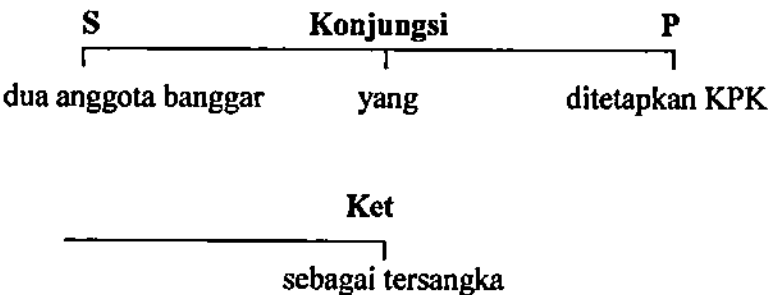
Ket2 unuk dijadikan panduan diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran penerima.

**Klausa Verbal 2 (dari Data 17)**



Klausa verbal (2) memiliki fungsi sintaksis S P. Unsur S adalah *aroma bau busuk korupsi* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita, unsur P adalah *sudah lama tercium* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan.

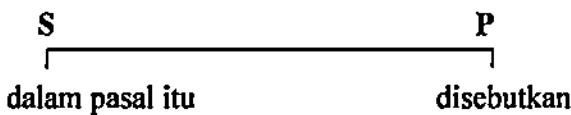
**Klausa Verbal 3 (dari Data 18)**



Fungsi sintaksis klausa di atas adalah S (Konjungsi P Ket). Unsur S adalah dua *anggota banggar* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran

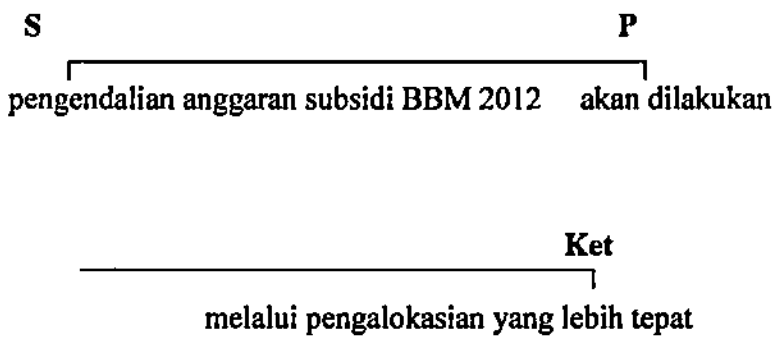
penderita, unsur *yang* berfungsi sebagai konjungsi, unsur P *ditetapkan KPK* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan, unsur Ket adalah *sebagai tersangka* diisi oleh kategori adverb menyatakan peran penerima.

**Klausa Verbal 4 (dari Data 20)**



Fungsi sintaksis klausa di atas adalah S P. Unsur S adalah *dalam pasal itu* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita, unsur P *disebutkan* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan.

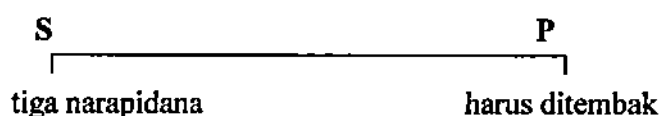
**Klausa Verbal 5 (dari Data 20)**



Klausa verbal (5) memiliki fungsi sintaksis S P Ket. Unsur S adalah *pengendalian anggaran subsidi BBM 2012* diisi oleh kategori frasa nomina

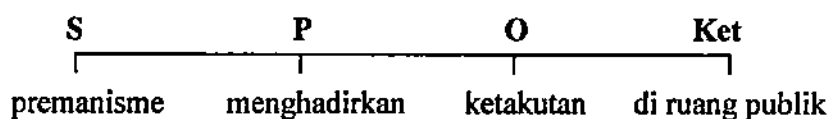
menyatakan peran penderita, unsur P adalah *akan dilakukan* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan, unsur Ket adalah *melalui pengalokasian yang lebih tepat* diisi oleh kategori adverb menyatakan peran cara.

### Klausur Verbal 6 (dari Data 21)



Fungsi sintaksis klausa di atas adalah S P. Unsur S adalah *tiga narapidana* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan peran penderita, unsur P *harus ditembak* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan.

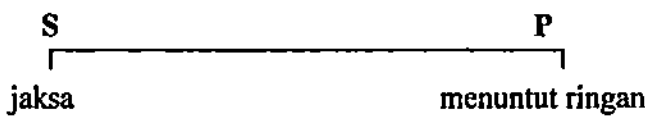
### Klausa Verbal 7 (dari Data 22)



Klausa verbal (7) memiliki fungsi sintaksis S P O Ket. Unsur S adalah *premanisme* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran pelaku, unsur P *menghadirkan* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur O

*ketakutan* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran hasil, unsur *Ket di ruang publik* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran tempat.

**Klausa Verbal 8 (dari Data 23)**



Fungsi sintaksis klausa di atas adalah S P. Unsur S adalah *jaksa* diisi oleh kategori nomina menyatakan peran pelaku, unsur P *menuntut ringan* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran perbuatan.

**Klausa Verbal 9 (dari Data 19)**

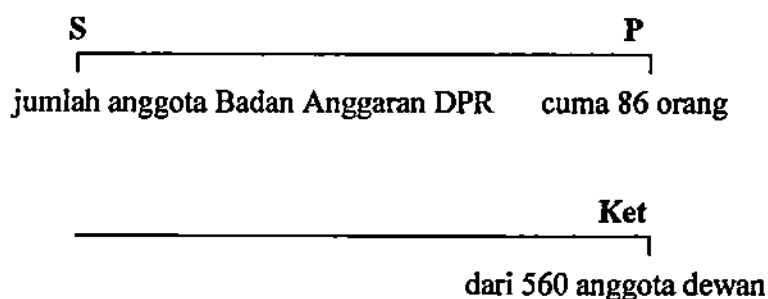


Klausa verbal (9) di atas memiliki fungsi sintaksis S Ket1 P Ket2. Unsur S adalah *terdakwa kasus korupsi* diisi oleh kategori frasa nomina menyatakan

peran pelaku, unsur Ket1 *dengan enteng* diisi oleh kategori frasa depan menyatakan peran cara, unsur P *melontarkan* diisi oleh kategori verba menyatakan peran perbuatan, unsur Ket *jurus tidak tahu, tidak ingat, dan lupa* diisi oleh kategori frasa verba menyatakan peran cara.

### 3.3.3.2 Fungsi, Kategori, dan Peran Klausa Bilangan

#### Klausa Bilangan (dari Data 24)



Klausa di atas memiliki fungsi sintaksis S P Ket. Unsur S adalah *jumlah anggota Badan Anggaran DPR* diisi oleh kategori frasa nomina memiliki peran terjumlah, unsur P *cuma 86 orang* diisi oleh kategori frasa numeral memiliki peran jumlah, unsur Ket *dari 560 anggota dewan* diisi oleh kategori frasa depan memiliki peran tempat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Ada tiga jenis klausa yang digunakan dalam surat kabar harian *Media Indonesia*, yaitu: (1) klausa berdasarkan struktur internnya, (2) klausa berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P, (3) klausa berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi P. Berdasarkan struktur internnya ada dua sub jenis klausa yang digunakan dalam surat kabar harian *Media Indonesia*, yaitu: klausa lengkap dan klausa tidak lengkap. Berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P ada dua sub jenis klausa yang digunakan dalam surat kabar harian *Media Indonesia*, yaitu: klausa positif dan klausa negatif. Berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi P ada dua sub jenis klausa yang digunakan dalam surat kabar harian *Media Indonesia*, yaitu: klausa verbal dan klausa bilangan.
2. Ada beberapa Fungsi sintaksis klausa yang digunakan dalam kolom editorial harian *Media Indonesia*, yaitu: SP, SPO, SPPel, SPOPel, SPKet, SPOKet, SKetPO, SKet1Ket2, SKet1PKet2, SKet1POKet2, SPKet1Ket2Ket3, SPPelKet1Ket2, S Konjungsi PKet, PPel, POKet, PO, POPel, PPelKet, Ket1SPKet2.

3. Kategori pengisi masing-masing fungsi sintaksis klausa yang digunakan dalam kolom editorial harian *Media Indonesia* diisi oleh kategori kata tertentu. Fungsi S diisi oleh kategori nomina, frasa nomina, dan pronomina. Fungsi P diisi oleh kategori verba, frasa verba, dan frasa numeral. Fungsi O diisi oleh kategori nomina dan frasa nomina. Fungsi Pel diisi oleh kategori nomina dan frasa nomina. Fungsi Ket diisi oleh kategori adverb, frasa numeral, dan frasa depan.
4. Ada beberapa peran sintaksis masing-masing fungsi klausa yang terdapat dalam kolom editorial harian *Media Indonesia*. Fungsi S memiliki peran sebagai pelaku, penderita, tempat, penerima, penyerta, jumlah, hasil dan sebab. Fungsi P memiliki peran sebagai perbuatan, keadaan, dan jumlah. Fungsi O memiliki peran sebagai penderita, penyerta, penerima, dan hasil. Fungsi Pel memiliki peran sebagai penderita. Fungsi Ket memiliki peran sebagai waktu, tempat, penerima, dan cara.

#### 4.2 saran

Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian tentang analisis klausa masih sedikit dilakukan. Hal ini disebabkan pengenalan pemahaman Sintaksis kurang diminati, khususnya mahasiswa. Dalam hal ini pemahaman konsep fungsi, kategori, dan peran sintaksis cukup rumit serta butuh intuisi kebahasaan yang tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Angraini. 2010. "Kalimat Majemuk yang Berklausa Relatif dalam Kolom Tajuk Rencana Harian Kompas". Padang: Universitas Andalas.
- Chaer, Abdul. 2007. *Lingustik Umum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Lingustik Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moeliono, Anton.M. 1992. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pengertian Editorial ([dalam http://editorial.com.html](http://editorial.com.html))
- Putrayasa, Ida Bagus. 2007. *Analisis Kalimat: Fungsi, kategori, dan Peran*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ragam Bahasa Media dalam Perspektif Pembelajaran Bahasa". [www.google.com](http://www.google.com). Januari 2012.
- Ramlan, M. 1987. *Ilmu Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Yogyakarta: CV. Karyono.
- Roidah. 1998. Skripsi "Analisis Bentuk Klausa Iklan Mini dalam Surat Kabar Haluan". Padang.: Universitas Andalas.

Rozhaldi, Beni. 2010. "Kallimat Luas Berklausa Relatif dalam Teks Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Padang. Padang: Universitas Andalas.

Sasdayati. 2010. Skripsi "Klausa Pada Teks Iklan Baris Dalam Surat Kabar Lokal Sumbar. Padang: Universitas Andalas.

Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Duta Wacana University Press.

Tarigan, Henry Guntur. 1986. *Pengajaran Sintaksis*. Bandung: Angkasa.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesi Pusat Bahasa Edisi Keempat* . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

[www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)

## EDITORIAL

Tragedi Keadilan  
Nenek Rasminah

TRAGEDI keadilan seperti tak habis melanda negeri ini. Parat terus saja pamer diskriminasi, begitu garang menindas rakyat jelata, tetapi lunglai ketika menghadapi kalangan berada dan berkuasa. Korban teranyar ialah Rasminah, nenek berusia 54 tahun. Mahkamah Agung memvonisnya empat bulan 10 hari. Rasminah memang tak perlu menjalani penjara lagi. Masa hukuman dalam vonis MA itu sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani Nenek Rasminah selama proses penyidikan.

Namun, vonis itu mengguncang rasa keadilan publik lantaran kesalahan sang nenek bisa disebut ecek-ecek. Ia dituding mencuri enam piring dan bahan sup buntut milik majikannya, Siti Aisyah MR.

Kasus Nenek Minah hingga Nenek Rasminah

makin mengusik

narani kita. Akan dibawa

ke mana sebenarnya

hukum di Republik ini?"

Ilakan tanggap editorial ini melalui [ndiaindonesia.com](http://ndiaindonesia.com)

yang sepertunya Haram mendapat keadilan. Di sisi lainnya, ia pun harus menanggung beban psikologis berat lantaran menyandang sebutan tak enak, yakni pencuri.

Pada sidang 22 Desember 2010, Pengadilan Negeri Tangerang sebenarnya memvonis bebas Rasminah.

Namun, jaksa berniat mengajukan kasasi. Akibatnya, untuk menyelamatkan wajah penegak hukum, MA memvonis sang nenek sesuai dengan masa tahanan, sehingga impas.

Warga Ciputat, Tangerang Selatan, itu harus meratapi nasib sebagai rakyat kecil yang sepertunya Haram mendapat keadilan. Di sisi lainnya, ia pun harus menanggung beban psikologis berat

Bukan kali ini saja wong cilik menjadi santapan kegarangan penegak hukum. Belum hilang dari ingatan ketika Nenek Minah, warga Banyuwangi, Jawa Tengah, divonis satu bulan 15 hari karena mencuri tiga buah kakao senilai Rp2.100 pada 2009.

Kemudian, November tahun lalu, Aguswaridi Tanjung dipenjara enam bulan kurungan karena dituduh mencuri listrik, padahal ia cuma menumpang mengecas ponsel di lobi sebuah apartemen.

Mimpi buruk penegakan hukum berlanjut di Palu, Sulawesi Tengah, saat seorang pelajar diancam hukuman lima tahun hanya karena mencuri sandal jepit seharga Rp30 ribu milik Bripu Ahmad Rusdi Harahap. Pada sidang 4 Januari 2012, ia divonis bersalah, tetapi dikembalikan ke orangtuanya.

Apa yang menimpa Nenek Rasminah merupakan bukti teramat nyata bahwa pedang hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Para penegak hukum di negeri ini kelebihan nyali ketika menindas para tunakusa.

Sebaliknya, mereka miskin akal dan keberanian untuk menjerat mereka yang disebut-sebut terlibat dalam perkara kakap, seperti Bank Century, Wisma Atlet, dan juga surat palsu Mahkamah Konstitusi.

Kita jelas harus menggugat, mengapa jaksa begitu gesit membawa kasus Rasminah ini ke MA? Bukankah hingga 2011 ada 8.000 lebih perkara kasasi dan peninjauan kembali yang tertunggak untuk segera diputus?

Kasus Nenek Minah hingga Nenek Rasminah semakin mengusik nurani kita. Akan dibawa ke mana sebenarnya hukum di Republik ini?

**EDITORIAL**

# Ancaman Limbah Beracun

GERI ini masih menjadi destinasi menarik limbah beracun dan beracun (B3). Sampah jajah yang arang dibuang di banyak negara diterima dengan yum di Indonesia. Banyaknya penampung yang siap dibayar di sini mbuat para pembuang B3 leluasa mengirim racun. Banyak 113 kontainer berisi logam bekas yang me- ndung B3 masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. ang buangan asal Inggris dan Belanda yang diimpor IHS tersebut masuk ke negeri ini lima kali sejak akhir ember 2011 hingga awal Januari 2012.

Temuan limbah B3 yang diimpor para pihak di Indo- nesia memang bukan kasus baru. Sejak era 2000-an, im- por B3 sudah mulai marak. Kuantitas dan kualitasnya semakin mencemaskan.

Itu tecermin dari jumlah kontainer yang ditemukan dari tahun ke tahun. Pada 2000, sebanyak empat kon- tainer B3 asal Korea Selatan disita petugas Bea dan Cukai. Pada Maret 2005, 14 kon- tainer limbah B3 asal Inggris juga berlabuh di Tanjung Priok. Temuan terakhir seba- nyak 113 kontainer B3 jelas merupakan lonjakan jumlah

Sudah  
saatnya pula  
a dan hakim  
pihak kepada  
lik, bukan  
ada penjahat  
kungan."

kan tanggap  
orial ini melalut  
jiaindonesia.com

mengerikan.

Banjir limbah B3 menjadi ancaman serius terhadap publik. Potensi bahayanya bagi kesehatan dan kesel- amatan pun tidak diragukan lagi karena lambat laun akan terurai, terpapar dengan mudah ke masyarakat melalui angin, air, dan asap.

Ironisnya, tindakan untuk mencegah dan menghu- kum pelaku kejahatan itu masih jauh di bawah standar. Teramat sulit menemukan kasus pelanggaran hukum lingkungan divonis dengan putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Salah satu hukuman terberat yang pernah dijatuhkan ialah vonis enam bulan penjara bagi mantan Direktur PT Asia Pacific Eco Lestari Rudy Alfonso, terdakwa perkara impor limbah B3 di Pengadilan Negeri Batam pada 2006. Yang lebih kerap terjadi ialah kasus diusut dan disidik, eksportir dan importirnya jelas dari segi dokumen, tetapi kasusnya jarang yang sampai ke pengadilan.

Kasus 113 kontainer B3 di Tanjung Priok harus diusut tuntas. Kuncinya ada pada kesungguhan untuk menghu- kum perusak keselamatan publik.

Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi harus lebih disiplin, khususnya antara Kementerian Keuangan me- lalui Bea dan Cukai, Kementerian Lingkungan Hidup melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta aparat kepolisian.

Sudah saatnya pula jaksa dan hakim berpihak kepada publik, bukan kepada penjahat lingkungan. Karena itu, kasus terakhir ini tidak boleh tinggal sebagai dark number.

# EDITORIAL

## Simpang Siur Kebijakan BBM

KEBIJAKAN bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin simpang siur. Mendekati tenggat pelaksanaan pada 1 April sesuai dengan amanat Undang-Undang APBN 2012, program pembatasan bukannya mengerucut ke satu opsi, melainkan melebar ke bermacam skema.

Awalnya pemerintah berwacana melarang kendaraan pribadi roda empat di Jabodetabek mengonsumsi BBM bersubsidi jenis premium. Semua mobil pribadi di Jabodetabek didorong beralih ke BBM nonsubsidi atau ke bahan bakar gas (BBG) yang lebih murah.

Namun, gaung wacana tersebut belakangan kian sepi. Yang muncul justru opsi kenaikan harga BBM bersubsidi yang sebelumnya tidak masuk opsi sama sekali.

Ada sejumlah usulan yang diajukan pemerintah, umpamanya, harga BBM bersubsidi untuk mobil pribadi naik setiap tahun, mulai tahun ini hingga 2014. Usulan lain, harga BBM bersubsidi naik tiap bulan dengan kisaran 5% hingga akhirnya subsidi dipangkas habis.

Pemerintah juga berwacana agar pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dimulai terbatas pada kendaraan dinas pemerintah.

Untuk pembatasan bagi mobil pribadi, pemerintah meminta kelengkapan waktu karena konversi BBM ke BBG butuh persiapan.

Jangan terus mengulur waktu dan menghitung popularitas dalam mengambil kebijakan soal BBM bersubsidi."

Silakan tanggapi Editorial ini melalui: [mcdiaindonesia.com](http://mcdiaindonesia.com)

Pemerintah mengaku masih menghadapi masalah pasokan gas, ketersediaan alat konversi, jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas yang minim, serta penyediaan BBM nonsubsidi di seluruh daerah yang belum merata.

Berputar-putarnya kebijakan BBM bersubsidi jelas merisaukan. Kalangan industri risau karena tidak ada kepastian. Masyarakat tidak kalah bingung karena implikasi kebijakan BBM bersubsidi biasanya cukup panjang terhadap harga-harga kebutuhan lainnya.

Tak hanya itu. Tarik ulur soal pembatasan BBM bersubsidi yang sudah diwacanakan sejak 2006 bahkan bisa memicu berbagai penyelewengan dan kontraproduktif terhadap anggaran.

Oleh karena itu, pemerintah jangan terus mengulur waktu dan menghitung popularitas dalam mengambil kebijakan. Melakukani tes pasar dengan bolak-balik melempar wacana justru hanya menambah kecang ketidakpercayaan publik.

Pemerintah seharusnya bersikap tegas. Sikap bimbang justru berpotensi menyebabkan gagalnya upaya menekan subsidi.

## EDITORIAL

# Jangan hanya Angelina

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi sebagian janji mereka. Lembaga antikorupsi itu, kemarin, menetapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh sebagai tersangka dalam kasus korupsi Wisma Atlet.

KPK juga mencegah politikus PDIP I Wayan Koster bepergian ke luar negeri hingga satu tahun ke depan. Nama Angelina dan Koster disebut dalam kasus Wisma Atlet yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

“Nyali KPK masih harus dibuktikan untuk menunjukkan kepada publik bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum, sekalipun ia ketua partai berkuasa.”

Silakan tanggapi Editorial ini melalui: [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)

Lebih dari dua saksi di persidangan Nazaruddin mengungkapkan adanya aliran dana Rp2 miliar dan Rp3 miliar ke Angelina dan Koster untuk mengegolkan anggaran proyek Wisma Atlet SEA Games 2011. Ketua KPK Abraham Samad berjanji penetapan bintang iklan katakan tidak pada korupsi. Itu sebagai tersangka merupakan pintu masuk menuju tersangka lainnya.

Keputusan KPK tersebut, kendati baru memenuhi sebagian janji, patut diapresiasi. Hal itu disebabkan selama ini kasus yang menyeret sejumlah elite Demokrat ter-

sebut berjalan bak siput, amat lambat jika dibandingkan dengan kasus lainnya yang ditangani KPK.

Dalam kasus cek pelawat, misalnya, KPK sangat gesit menetapkan para tersangka. Dalam kasus dana percepatan infrastruktur daerah, KPK bahkan hanya butuh waktu sebulan untuk menjerat anggota DPR dari PAN Wa Ode Nurhayati sebagai tersangka.

Dengan menjadikan Angelina sebagai tersangka, harapan publik bagi terungkapnya kasus Wisma Atlet yang sempat redup kini kembali menyala.

Namun, itu belum cukup.

KPK masih punya utang janji yang jauh lebih besar nilainya, yakni menjerat nama lain yang santer disebut terlibat kasus Wisma Atlet.

Nama Ketua Umum Partai Demokrat Andri Urbaningrum, misalnya, disebut baik oleh Nazaruddin, Minda Rosalina Manulang, maupun Yulianis terlibat proyek senilai Rp191 miliar itu.

Nyali KPK masih harus dibuktikan untuk menunjukkan kepada publik bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum, sekalipun ia ketua partai berkuasa.

EDITORIAL

# Kemudahan Berbisnis yang Memprihatinkan

KABAR buruk menimpa negeri ini bak petir di siang bolong. Betapa tidak? Di tengah capaian *investment grade* Indonesia yang baru, seumur jagung, International Finance Cooperation (IFC) World Bank tiba-tiba menganggap negara ini sebagai tempat dengan kemudahan berbisnis yang memprihatinkan.

Dalam laporan *Doing Business in Indonesia 2012*, IFC menyebut kemudahan berbisnis di Indonesia jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara APEC. IFC menjadikan biaya dan waktu yang dihabiskan untuk mengurus izin usaha serta biaya pendaftaran properti sebagai indikator.

Untuk mendirikan usaha, pengusaha di Indonesia harus menunggu hampir satu bulan lebih lama ketimbang Malaysia. Para pengusaha juga harus menghabiskan waktu empat kali lipat lebih lama jika dibandingkan dengan pengusaha di Thailand.

Dalam penelitian tentang kemudahan berbisnis di 20 kota di Indonesia, IFC menemukan pengusaha harus menempuh sembilan prosedur selama 33 hari dan menghabiskan biaya 22% dari pendapatan per kapita nasional. Bandingkanlah dengan pengusaha di Malaysia yang hanya menempuh empat prosedur selama enam hari serta menghabiskan ongkos

uma 16,4% dari pendapatan per kapita nasional.

IFC juga melaporkan biaya pendaftaran properti di Indonesia yang mencapai 11% dari nilai properti merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik dan rata-rata global. Di negara-negara ASEAN, biaya pendaftaran properti berkisar 0,6% sampai 6,3%, sedangkan rata-rata global hanya 5,7% dari nilai properti.

Kemudahan berbisnis yang memprihatinkan itu tentu membuat pengusaha asing dan dalam negeri berpikir seribu kali untuk berinvestasi. Iklim berbisnis di Indonesia makin terpuruk dengan maraknya ongkos siluman.

Penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri mengungkap biaya siluman yang dikeluarkan perusahaan berada di kisaran 25% dari total biaya produksi.

Semua ekonomi ongkos tinggi itu membuat pengusaha terpaksa menekan upah buruh untuk mengurangi besarnya biaya produksi. Terjadilah perbedaan upah buruh yang diinginkan pengusaha dan yang ditetapkan pemerintah yang kemudian memicu perlawanan buruh besar-besaran.

Indonesia boleh mencontoh Negara Bagian Maharashtra di India yang pemerintahnya justru menikmati pendapatan lebih setelah memberlakukan biaya rendah dalam berbisnis.

Kemudahan berbisnis yang memprihatinkan itu membuat investor asing maupun dalam negeri berpikir seribu kali untuk berinvestasi.

Salah satu tanggapan  
tentang masalah ini adalah  
mediaandonesia.com

EDITORIAL

# Point of no Return

**HAMBATAN** psikologis dan politis terbesar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus korupsi Wisma Atlet yang diduga melibatkan kader-kader Partai Demokrat-sirna sudah.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-lah yang melempengkan jalan bagi KPK.

Dalam konferensi pers di Cikeas, Bogor, Minggu (5/2), Yudhoyono dengan tegas menyatakan sangat menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK terkait dengan kasus Wisma Atlet.

Ia percaya KPK akan melakukan proses hukum secara adil, objektif, dan tepat. Secara implisit, Yudhoyono bahkan mendorong KPK bergerak lebih cepat dalam memproses kasus itu, antara lain dengan menyatakan tidak percaya KPK akan mengulur-ulur penanganan kasus tersebut sehingga Partai Demokrat menjadi bulan-bulanan pada Pemilu 2014.

Ada lima nama kader Partai Demokrat yang selalu disebut-sebut sejak penyelidikan hingga persidangan kasus Wisma Atlet. Mereka ialah Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Mirwan Amir, dan Andi Mallarangeng.

Nazaruddin sudah menjadi terdakwa. Angelina Sondakh sudah ditetapkan sebagai tersangka. Fakta-fakta dan bukti hukum yang diperlukan KPK untuk menjerat mereka yang diduga terlibat pun sudah terungkap demikian transparan di persidangan.

KPK kini berada di jalan bebas hambatan untuk menuntaskan kasus Wisma Atlet. Inilah *point of no return* bagi KPK dalam membongkar habis kasus itu. Karena itu, KPK tidak boleh berhenti pada Angelina Sondakh.

Kasus Wisma Atlet kasus berwajah majemuk. Pertama, kasus itu menunjukkan korupsi menyangkut proyek negara justru semakin hebat di zaman Yudhoyono ini.

Kedua, tidak cukup keberanian moral partai yang berkuasa untuk membersihkan diri mereka dari penyakit korupsi. Moralitas itu ditenggelamkan kesucian asas praduga tidak bersalah, yang di tengah mafia hukum, kesucian itu justru harus dipertanyakan.

Ketiga, jika yakin diri bersih, apa sulitnya bagi seorang Anas Urbaningrum untuk melakukan pembuktian terbalik dari manakah asal usul kekayaan pribadinya?

Yudhoyono sudah mendorong KPK bergerak lebih cepat. Namun, jauh lebih terhormat lagi bila Yudhoyono juga proaktif menegakkan disiplin dan etika partai tanpa harus menunggu KPK bekerja membuktikan kebusukan kader-kadernya.

“ Apa sulitnya bagi seorang Anas Urbaningrum untuk melakukan pembuktian terbalik dari manakah asal usul kekayaan pribadinya?”

Silakan tanggap Editorial ini melalui: [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)



EDITORIAL

# Sanksi Sosial

YAT semakin sadar bahwa korupsi merupakan natan luar biasa. Kesadaran itu tampak dengan je- etika rakyat memberi apresiasi yang tinggi, sangat kepada partai politik yang gencar mengampa- an antikorupsi. aliknya, rakyat tidak segan-segan pula mengganjar- si kepada partai yang menuruti persepsi mereka, partai itu terlibat korupsi, apalagi dianggap bersé- dengan koruptor. esiasi tinggi diberikan rakyat kepada Partai De- at yang mengusung tema kampanye antikorupsi Pemilu 2009. Iklan Partai Demokrat yang berju- atakan *tidak pada Korupsi* adalah promosi ampuh- antar Demokrat menjadi partai berkuasa.

ka itu rakyat terpukau dengan penampilan kader Partai Demokrat dalam iklan antikorupsi. Bintang kampanye tersebut berhasil menjadi anggota DPR, yaitu Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Edhie IBas Baskoro. Bah- kan, dua nama terakhir itu kini menjadi ketua umum dan sekjen partai.

Tidak hanya itu. Perolehan suara Partai Demokrat yang pada 2004 cuma 7,4% lang- sung melambung menjadi 20,4% pada Pemilu 2009. Kemenangan fantastis juga diraih Susilo Bambang Yu- dhoyono yang berpasangan dengan Boediono dalam pe- presiden. Pasangan itu menang telak dalam satu dengan meraih 60,8% suara.

Persepsi itu mahadahsyat bisa iklan sebuah berkuasa tinggal an sejarah.

tanggapi ini melalui indonesia.com

Ternyata Partai Demokrat tidak konsisten antikorupsi. Sang bintang iklan antikorupsi, Angelina Sondakh, kini ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet. Mantan bendahara umum partai, Muhammad Na- zaruddin, lebih dulu menjadi terdakwa kasus yang sama. Nama Anas juga kian nyaring disebut di persidangan bersama Andi Mallarangeng dan Mirwan Amir.

Rakyat tanpa ampun memberi sanksi kepada Partai Demokrat yang tidak konsisten antikorupsi, apalagi tidak tegas memberi sanksi kepada kader yang disebut-sebut itu, seperti tampak dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang dirilis 5 Februari.

Elektabilitas Partai Demokrat pada Januari 2011 ma- sih 20,5%. Ketika kasus Wisma Atlet meledak pada Mei 2011, dukungan rakyat pun menurun menjadi 15,5% pada Juni dan 16,6% pada Oktober. Saat ini, dukungan rakyat tinggal 13,7%.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bam- bang Yudhoyono mengakui kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah kadernya menimbulkan ekse- nurunnya dukungan publik terhadap Demokrat. Akan tetapi, pengakuan saja belum cukup. Rakyat tidak butuh omong, tapi butuh tindakan nyata sebelum memasuki proses hukum.

Sangatlah jelas logika yang dibangun Partai Demokrat tidak sama dengan persepsi rakyat. Partai Demokrat baru memberi sanksi setelah kadernya dinyatakan bersalah secara hukum, sedangkan rakyat menuntut penonakufan kader sebelum proses hukum.

Rakyat akan mengikuti persepsinya dan memberi sanksi sosial sejalan dengan persepsi itu. Merosotnya elektabilitas jelas akibatnya. Kita ingatkan, persepsi itu mahadahsyat karena bisa menjadikan sebuah partai berkuasa tinggal kenangan sejarah.

## EDITORIAL

## Memburu Piramida

KABAR penemuan benda purbakala mirip piramida di sejumlah kawasan di Indonesia menimbulkan kehebohan sekaligus mengundang perdebatan.

Benda serupa piramida itu disebut-sebut ada di wilayah Gunung Sadahurip, Garut, dan Gunung Padang, Cianjur, serta daerah sekitar kawasan Bandung, Jawa Barat.

Tim Studi Bencana-Katastropik Purba yang dibentuk Staf Ahli Presiden Bidang Kebencanaan dan Bantuan Sosial, Andi Arief, berambisi melacak adanya piramida di bawah bukit itu. Namun, tim belum berani menyimpulkan benda itu sebagai piramida.

Dugaan bangunan purbakala mirip piramida itu tidak berlebihan. Selain berbagai pakar diikutsertakan, tim juga menggunakan peralatan canggih.

**Kerja seperti itu lebih relevan, ketimbang memburu piramida yang hasil akhirnya sekadar pepesan kosong.**

Editorial ini melaut mediaindonesia.com

untuk memburu piramida itu.

Menurut tim, hasil analisis terhadap batuan kemudian ditambah dengan hasil citra *global positioning system* (GPS/sistem navigasi satelit), pendekatan struktur geologi dari foto udara, sungguh mengesankan.

Rupanya, tim tersebut memburu piramida itu sejak tahun lalu. Bahkan, sebelum berburu di kawasan Garut dan sekitarnya, tim sudah melakukan penelitian serupa di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Entah, berapa dana yang sudah dikeluarkan

Penemuan berbagai benda purbakala jelas memiliki nilai yang berharga. Temuan-temuan itu tidak saja mencerminkan sejarah panjang bangsa, tapi juga menjadi ukuran seberapa tinggi tingkat peradaban dan kebudayaan.

Namun, benarkah ada piramida di Indonesia? Celakanya, sejak lama tidak ada fakta yang memperlihatkan bukti-bukti arkeologi yang mendukung keberadaan piramida di Nusantara. Apalagi, nenek moyang bangsa ini amat jauh berbeda dengan nenek moyang di negeri asal piramida, Mesir.

Karena itu, perburuan piramida itu seharusnya dihentikan. Sebab, arkeologi bukanlah disiplin yang berbasis angan-angan, sekalipun betapa membanggakan angan-angan bahwa Indonesia sebenarnya merupakan awal dari pusat kebudayaan dunia.

Yang mengherankan, perburuan piramida justru dipimpin Staf Khusus Presiden Bidang Kebencanaan dan Bantuan Sosial. Staf khusus itu kayaknya kurang kerjanya seakan di negeri ini tidak lagi bencana. Padahal, bencana terus terjadi silih berganti dengan korban memilukan dan belum tertangani secara memadai. Bantuan seret dan korban hidup di tenda-tenda pengungsian di bawah ancaman berbagai penyakit.

Ketimbang terus memburu piramida, jauh lebih besfari bila Staf Khusus Presiden Bidang Kebencanaan dan Bantuan Sosial mengurus para korban bencana alam.

Kerja seperti itu lebih relevan, ketimbang memburu piramida yang hasil akhirnya sekadar pepesan kosong.

# EDITORIAL

## Darurat Pangan

DALAM pangan ternyata terus menjadi masalah yang tidak kunjung tuntas. Julukan sebagai lumbung pangan yang disematkan pada negeri ini juga tidak mengga-  
nsi Indonesia terbebas dari krisis pangan.

Dalam seminar Food Security Summit 2012 di Jakarta, awal pekan ini, kekhawatiran bakal munculnya krisis pangan kembali mengemuka.

Sebabnya jelas, yakni ketersediaan lahan dan produksi pangan tidak mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk.

Badan Pangan dan Pertanian Dunia menyatakan penduduk dunia kini sudah 7 miliar. Diperkirakan pada 2045 populasi dunia akan menggembung menjadi 9 miliar orang. Indonesia menghadapi kondisi serupa.

Krisis pangan

bisa bergeser

menjadi krisis politik

it yang kian

ditangani. Kita

tu sangat tidak

inginkan itu

ad/

akan tanggap

itorial ini melal

ediaindonesia.com

0 yang mencapai sekitar 40,88 juta ton.

Implikasinya, produksi pangan harus semakin banyak, tetapi lahan pertanian justru kian menyempit. Ringginya konversi lahan pangan ke nonpangan membuat produksi pangan cenderung stagnan.

Produksi beras nasional yang menjadi makanan pokok masyarakat tahun lalu hanya sekitar 38,96 juta ton. Angka itu turun hampir 2 juta ton jika dibandingkan dengan produksi beras pada 0 yang mencapai sekitar 40,88 juta ton.

Di tengah produksi beras yang merosot, jumlah penduduk naik signifikan. Jika pada 2010 jumlah penduduk sekitar 231 juta jiwa, tahun lalu naik menjadi 241 juta orang.

Kondisi itu diperparah oleh pola konsumsi beras masyarakat yang berlebihan hingga 120 kilogram per kapita per tahun.

Angka itu dua kali lebih besar ketimbang negara-negara tetangga. Bahkan, pada 2011 untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, pemerintah harus mengimpor 2,75 juta ton beras.

Kita sebenarnya sudah mengarah ke situasi darurat pangan untuk jangka yang tidak terlalu lama. Celakanya, para pemangku kepentingan belum melihat problem pangan sebagai masalah serius, apalagi darurat.

Pemerintah bukan saja lemah mengintegrasikan ketersediaan lahan, tapi juga terkesan membiarkan infrastruktur pertanian tidak terurus. Lebih dari 52% irigasi rusak parah.

Karena itu, para pemangku kepentingan harus sigap menempuh tiga langkah sekaligus, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melakukan penyelamatan. Krisis pangan bisa benar-benar menjadi kenyataan jika persoalan yang sangat serius itu masih dipandang biasa-biasa saja.

Bahkan, dalam skala tertentu, krisis pangan bisa bergeser menjadi krisis politik akut yang kian sulit ditangani.

Kita tentu sangat tidak menginginkan itu terjadi.

**DITORIAL**

# Setelah KPK Membongkar Banggar

DAH sepekan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (PKO) menggeledah ruang kerja anggota dan pimpinan dan Anggaran (Banggar) DPR. Namun, hingga kini, hasil menggeledahan itu belum secuil pun muncul ke publik. Langkah penyidik KPK mencari dokumen dengan mengok- bok ruang kerja anggota dan pimpinan banggar pada mat (10/2) jelas bukan kerja main-main. Itulah bagian nting untuk mengungkap dugaan korupsi di lembaga hormal tersebut. Dugaan itu selama ini ibarat angin, bisa dirasakan, tetapi sulit di- buktikan.

**Publik berhak** tahu; apakah selama ini jam menyisir ruang kerja banggar, para penyidik KPK mengangkil bertumpuk dokumen baik *hard copy* mau- pun *soft copy*. Tentu, teramat banyak petunjuk yang diraup untuk membuktikan adanya penggarangan uang negara di sana.

Kita patut mengapresiasi kerja keras KPK. Namun, se- mua itu masih jauh dari cu- kup. Tidak ada artinya jika dokumen yang sudah disita disimpan begitu saja. Tak ada artinya pula kalau hasil penye- lidikan terhadap seabrek data

akan tanggap  
ditorial ini melalui:  
eddi@indonesia.com

ia untuk kalangan orang dalam

Adanya dugaan praktik korupsi di Banggar DPR bukan lah tanpa alasan. Anggota banggar, Wa Ode Nurhayati, blak-blakan mengakui bahwa mafia anggaran memang gentayangan di badan tersebut. Itu pengakuan yang berani, meski akhirnya ia harus menjadi pesakitan dengan status tersangka kasus dugaan suap dana percepatan pembangun- an infrastruktur daerah 2011.

Posisi Banggar DPR sungguh vital di negeri ini. Ia ibarat jantung yang menentukan detak dan gerak pembangunan lan- taran berwenang menentukan besaran anggaran proyek- permufakatan. Jauh di banggar tidak hanya bisa mengakali alokasi anggaran sehingga terjadi dislokasi anggaran, tetapi juga bisa menggiring anggaran masuk ke kantong sendiri, kelompok, bahkan partai.

Karena itulah kita mendesak KPK benar-benar total mena- ngani kasus tersebut. Segera umumkan hasil penyelidikan dokumen yang didapat dari ruang kerja anggota dan pim- pinan banggar itu. Jangan terlalu lama menyimpan karena bisa raih hilang dan lenyap kemudian tidak bisa menjadi fakta hukum.

Publik berhak tahu, apakah hanya Wa Ode yang disangka- kan memainkan anggaran atau ada petinggi lain di banggar yang lebih kejam mengasak uang rakyat? Publik juga ber- tanya, apakah penyelewengan anggaran hanya mengalir ke kantong perorangan anggota dewan atau juga mengalir ke partai politik untuk menggendutkan pundi-pundi partai?

KPK gesit menetapkan Wa Ode, yang mengungkap kebu- sukan para koleganya, menjadi tersangka. Mestinya, KPK juga lebih sigap menindak para mafia yang masih leluasa berkeliaran.

RIAL

# Integritas LP dan CCTV

petasyarakat (LP) di negeri ini bukan lagi t penjahat dipenjara menjalani masa hukuman. menjerma menjadi vila dengan segala kemewahan yang bisa dibeli.

contoh untuk itu, Narapidana maupun tahanan bisa keluar masuk bui atau rumah tahanan (rutan) membayar upeti kepada petugas. Gayus Tambunan itu kemudian bisa pelesir ke Bali bahkan sampai negeri.

upun tahanan bisa juga membangun ruang me- p dengan pendingin ruangan, televisi, dan kulkas. aryani mendirikan istana mewah itu di Rutan mbu, Jakarta Timur.

Bahkan, dari penjara pun napi atau tahanan bisa mengendall- kan bisnis narkoba. Di LP Narko- ba Nusakambangan, Cilacap, napi Hartono Jaya bisa leluasa mengendalikan bisnis barang haram tersebut. Hal itu terjadi berkat kerja sama dengan Kepala LP Narkoba Nusakambangan Marwan Adli yang baru saja divonis 13 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Cilacap.

Kisan terakhir ialah kunjung- an anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir dari Partai Demokrat menemui terdakwa Nazaruddin di Rutan Cipinang, Jakarta, di luar Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indr- ukan inspeksi mendadak ke Rutan Cipinang ngan malam pada Rabu (8/2) dan ia menangkap nuan itu.

semua  
dan rutin  
CCTV  
sar biaya  
mburkan

mesia.com

Kegiatan di Rutan Cipinang itu diketahui Denny dari CCTV (closed circuit television) di Rutan Cipinang yang tersambung langsung ke Ruang Menteri Hukum dan HAM serta Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Bobroknya LP maupun rutin bukan fakta baru. Publik sudah paham bahwa kehobrokan petugas LP dan rutin karena lemahnya integritas petugas. Integritas petugas itulah yang dibeli para penjahat.

Tugas Menteri Hukum dan HAM serta Wakil Menteri Hukum dan HAM ialah membina para petugas LP dan rutin agar memiliki integritas tinggi, tidak mudah kompromi, dan menolak segala bentuk transaksi. Memasang CCTV dan kemudian memantau dari ruang kerja tentu saja membantu menteri dan wakil menteri melakukan pengawasan, tetapi jelas itu bukan cara yang dapat diterapkan untuk seluruh LP di Indonesia.

Jumlah LP dan rutin di Indonesia saat ini 428 buah. Jika semua LP dan rutin dipasang CCTV, berapa besar biaya yang dihabiskan untuk itu?

Jika seluruh CCTV di LP dan rutin tersambung langsung ke ruangan menteri dan wakil menteri, apakah kedua pejabat itu dapat memantau semuanya? Lagi pula, apakah tugas menteri dan wakil menteri hanya memantau CCTV? Jika menteri atau wakil menteri tidak berada di ruangan, siapa pula yang memantau CCTV itu? Apakah pelanggaran yang tidak terpantau menteri atau wakil menteri melalui CCTV dianggap benar?

Memata-matai bawahan melalui CCTV merupakan bentuk ketidakpercayaan. Karena itu, terpenting bukanlah mema- sang CCTV yang tersambung langsung ke ruangan menteri dan wakil menteri, melainkan membentuk integritas petugas LP dan rutin yang tangguh yang tak dapat dibeli.

Character building itulah yang tidak terjadi di negeri ini.



# EDITORIAL

## Perbuatan Bukan Pernyataan

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono berdialog dengan wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/2). Presiden menjawab lebih dari 10 pertanyaan, di antaranya tentang korupsi dan kasus GKI Yasmin Bogor.

Tentang pemberantasan korupsi, Presiden mengakuinya sebagai pekerjaan sulit. Padahal, kata Presiden, pemberantasan korupsi dalam tujuh tahun terakhir terbilang agresif.

Benarkah agresif? Fakta menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak signifikan alias minimalis. Data Transparency International (TI) tentang indeks persepsi korupsi 2011 menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia hanya meningkat 0,2, yaitu dari 2,8 menjadi 3,0.

Pemberantasan korupsi di negeri ini sulit dan jauh dari signifikan berawal dari absennya keteladanan. Dalam iklan

Jika tahu  
dan mampu  
tapi tidak juga  
bertindak, sama saja  
dengan tidak tahu  
dan tidak mampu.

akan berujung  
pada kegagalan.  
ediamdonesia.com

politikanya, Partai Demokrat, partai tempat SBY menjadi ketua dewan pembina, menyatakan perang melawan korupsi. Presiden juga mengatakan akan menghunus pedang keadilan dan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Kenyataannya korupsi justru terjadi di tubuh partai berkuasa itu. Kini sejumlah elite Demokrat tersandung oleh hukum. Mestinya SBY memerintahkan pengusutan nama-nama kader Demokrat yang disebut-sebut dalam kasus Wisma Atlet. Ia bahkan seharusnya mendesak mereka melakukan pembuktian terbalik sehingga jelas asal kekayaan mereka. Dengan begitu, SBY memberi teladan unitas pemberantasan korupsi di partainya sendiri. Pemberantasan korupsi terasa sulit dan tidak signifikan lantaran lebih banyak diucapkan daripada direalisasi. Indonesia Corruption Watch mencatat, sepanjang Oktober 2009 hingga Oktober 2010, Presiden melontarkan 34 pernyataan soal pemberantasan korupsi. Namun, menurut data yang terealisasi cuma 24%. Selebihnya hanyalah ucapan kosong.

Dalam perkara GKI Yasmin, celakanya Presiden cenderung menyerahkan penyelesaian kepada kepala daerah lewat jalur nonhukum. Persoalan itu berlarut-larut karena pemerintah mengabaikan rekomendasi Ombudsman dan putusan Mahkamah Agung yang bersifat *inkracht van gewijsde* alias berkekuatan hukum tetap. Ombudsman dan MA menyatakan pencabutan izin mendirikan bangunan GKI Yasmin merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus GKI Yasmin pun publik mendambakan tindakan konkret, bukan pidato. Publik berharap Presiden turun tangan menyelesaikan kasus itu setara hukum dengan mengacu kepada putusan MA dan rekomendasi Ombudsman.

Dengan menuntaskan masalah GKI Yasmin, Presiden membereskan persoalan di rumah sendiri. Kediaman Presiden di Cikeas dan GKI Yasmin berada dalam wilayah yang sama, yakni wilayah Bogor.

Menyelesaikan persoalan di negeri ini membutuhkan tindakan, bukan sekadar retorika. Presiden semestinya tahu dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Namun, jika tahu dan mampu tetapi tidak juga bertindak sama saja dengan tidak tahu dan tidak mampu.

## EDITORIAL

## Paradoks Pertumbuhan

PEREKONOMIAN Indonesia kembali menunjukkan kemolekannya. Di tengah perlambatan yang terjadi di sejumlah negara, perekonomian Indonesia ternyata mampu tumbuh 6,5% pada 2011.

Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam 15 tahun sejak 1996. Pada tahun itu, ekonomi RI tumbuh 7,8%.

Tak cuma itu. Pada 2011, pendapatan per kapita juga meningkat mencapai Rp30,8 juta (US\$3.542,9). Padahal, pada 2010 pendapatan per kapita baru Rp27,1 juta (US\$3.010,1).

Indonesia selayaknya bangga dengan pencapaian tersebut. Hal itu mengingat pertumbuhan semakin mendekati angka di masa sebelum krisis moneter melanda negara yang pernah menyandang predikat 'Macan Asia' ini.

**“ Percuma memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang molek jika tidak menetes sampai ke masyarakat golongan bawah.”**

Silakan tanggapi Editorial ini melalui: [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)

Sayangnya, cantiknya pencapaian ekonomi itu menimbulkan kontradiksi. Salah satunya ialah turunya kontribusi sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja sangat besar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan hanya berkontribusi 14,7% terhadap PDB. Padahal, tahun sebelumnya sumbangan dari sektor-sektor tersebut mencapai 15,3%. Demikian pula sektor industri pengolahan yang pada

2010 menyumbang 24,8% terhadap PDB turun menjadi 24,3% pada tahun lalu.

Turunnya kontribusi sektor-sektor tersebut dikhawatirkan bakal menggelembungkan pengangguran.

Masuk akal kalau geliat sektor-sektor tersebut terbelenggu.

Sektor industri pengolahan masih terbelit oleh banyak masalah seperti infrastruktur, birokrasi, perpajakan, dan korupsi. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan juga masih terhambat masalah perizinan, penyediaan lahan, dan modal.

Karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah yang masih melilit sektor-sektor tersebut. Percuma memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang molek jika tidak menetes sampai ke masyarakat golongan bawah.

Itulah paradoks pertumbuhan yang bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diatasi.

TORIAL

# Antasari Lorong Gelap

DAS sudah perjuangan Antasari Azhar mencari keadilan Mahkamah Agung pada Senin (13/2) menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Angan demikian, Antasari tetap dinyatakan bersalah dan harus menjalani 18 tahun penjara karena terbukti terlibat pembunuhan berencana atas Direktur PT Putra Rajawali Banjarnegara Nasrudin Zulkarnaen.

Di Mahkamah Agung belum menyebutkan pertemuan majelis hakim yang terdiri dari Hakim Agung Harlin Nipah, Joko Sarwoko, Komariah, Sapardjaya, Imron Andani, dan Hatta Ali. Yang sudah jelas putusan itu diambil dengan suara bulat tanpa ada *dissenting opinion* atau keberatan dari hakim. Majelis hakim tentu mempertimbangkan dengan cermat, sangat cermat, tiga bukti baru yang diajukan Antasari dan 48 kekhilafan hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan yang mengadili kasus itu. Tiga bukti yang dijadikan *novum* ialah tembak foto Nasrudin sebelum dan sesudah autopsi oleh Abdul Muhsin dan foto mobil Nasrudin yang menunjukkan bekas tembakan pada kaca mobil dan hasil penyadapan KPK terhadap nomor telepon seluler yang digunakan Nasrudin.

Novum itu Antasari ingin menunjukkan tidak ada singkat berupa ancaman yang ia kirim kepada Nasrudin. Ternyata ada peluru lain yang ditembak ke tubuh Nasrudin di luar dua peluru yang selama ini dijadikan bukti. Singkat kata, novum tersebut justru menunjukkan ada rekayasa menjerat Antasari dalam kasus pembunuhan.

Tak ada gading yang tak retak. Sejarah peradilan pun diwarnai salah. Vonis seperti dalam kasus Sengkon dan Kartas yang dituduh membunuh tetangga mereka. Pembunuh sebenarnya justru terungkap setelah dua orang itu menjalani separuh hidup di bui.

Jangan sampai Antasari menjalani peradilan sesat. Apalagi Komisi Yudisial menemukan adanya pelanggaran kode etik oleh tiga hakim yang menanggapi kasus Antasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Komisi Yudisial menilai tiga hakim itu, yakni Heri Swantoro, Prasetyo Ibnu Asmara, dan Nugroho Setiaji, melanggar prinsip profesionalitas karena mengabaikan sejumlah barang bukti penting di pengadilan.

Itulah sebabnya Komisi Yudisial mengeluarkan rekomendasi agar Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada tiga hakim itu. Akan tetapi, lembaga tertinggi peradilan itu malah mempromosikan mereka. Lebih aneh lagi Mahkamah Agung malah menghapus delapan poin kode etik yang dilanggar.

Semangat membela korps sangat kental terasa dalam keputusan peninjauan kembali sampai sampai buruk rupa hakim, kode etik yang dibela. Antasari kini berjalan tertatih-tatih di lorong gelap keadilan.

Sekalipun demikian, sekalipun hukum compang-camping, sekalipun peradilan itu sesat, orang harus menghormati putusan hakim. Tradisi menghormati putusan pengadilan sama pentingnya dengan keadilan itu sendiri.

Tak ada gading yang tak retak. Sejarah peradilan pun diwarnai salah. Vonis seperti dalam kasus Sengkon dan Kartas yang dituduh membunuh tetangga mereka. Pembunuh sebenarnya justru terungkap setelah dua orang itu menjalani separuh hidup di bui.

Jangan sampai Antasari menjalani peradilan sesat. Apalagi Komisi Yudisial menemukan adanya pelanggaran kode etik oleh tiga hakim yang menanggapi kasus Antasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Komisi Yudisial menilai tiga hakim itu, yakni Heri Swantoro, Prasetyo Ibnu Asmara, dan Nugroho Setiaji, melanggar prinsip profesionalitas karena mengabaikan sejumlah barang bukti penting di pengadilan.

Itulah sebabnya Komisi Yudisial mengeluarkan rekomendasi agar Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada tiga hakim itu. Akan tetapi, lembaga tertinggi peradilan itu malah mempromosikan mereka. Lebih aneh lagi Mahkamah Agung malah menghapus delapan poin kode etik yang dilanggar.

Semangat membela korps sangat kental terasa dalam keputusan peninjauan kembali sampai sampai buruk rupa hakim, kode etik yang dibela. Antasari kini berjalan tertatih-tatih di lorong gelap keadilan.

Sekalipun demikian, sekalipun hukum compang-camping, sekalipun peradilan itu sesat, orang harus menghormati putusan hakim. Tradisi menghormati putusan pengadilan sama pentingnya dengan keadilan itu sendiri.

101 211611 11112012



## Angie Katakan Sejujurnya

Sabtu, 18 Februari 2012 00:00 WIB

DEMOKRASI akan benar-benar tegak jika ia ditopang salah satunya oleh kejujuran para politikus. Namun, justru dalam soal itulah neraca demokrasi kita defisit.

Banyak politikus kita mengumbar kata dusta, baik yang terkait dengan janji maupun jika mereka terbelit perkara. Inflasi dusta pun terjadi sehingga publik kehilangan kepercayaan.

Tu pula nuansa yang ditangkap publik saat anggota DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondakh memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi Wisma Atlet dengan terdakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, Rabu (15/2).

di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta itu, Angelina yang berstatus tersangka menyangkal telah melakukan percakapan dengan Mindo Rosalina Manulang terkait dengan kasus Wisma Atlet lewat BlackBerry Messenger (BBM). Angelina menyebut baru memiliki BlackBerry pada akhir 2010, padahal percakapan itu terjadi pada awal 2010.

kan tetapi, foto-foto yang dipublikasikan pewarta foto menunjukkan Angelina sudah memakai BlackBerry sejak 2009. Hasil analisis rekan Angelina di Demokrat yang juga ahli telematika, Roy Suryo, bahkan menunjukkan foto-foto itu diambil pada 2 Juni 2009 di Gedung Nusantara I DPR.

kan cuma itu. Ketika dicecar majelis hakim, penuntut umum, dan pengacara, Angelina banyak menjawab dengan kata 'tidak ada', 'tidak tahu', 'tidak pernah', atau 'tidak kenal'.

padahal, dalam beberapa kesaksiannya Mindo Rosalina menyebutkan beberapa kali berhubungan dengan Angelina, khususnya terkait dengan pembahasan proyek Wisma Atlet.

Nazaruddin pun berulang-ulang dalam persidangan menyatakan secara detail soal kaitan dengan Angelina.

tidak mengherankan jika beberapa pakar psikologi forensik menyebutkan Angelina berada di bawah kendali pihak lain saat memberikan kesaksian. Mereka menduga jawaban-jawaban Angelina sudah diskenariokan.

Anggota Demokrat pun mendesak Angelina untuk jujur. Bagi Demokrat, dusta hanya akan menambah panjang daftar penyebab runtuhnya kepercayaan kepada partai yang berkuasa itu.

Bagi Angelina, menutup-nutupi fakta hanya akan menambah daftar ancaman hukuman. Berbohong tidak saja menyebabkan Angelina kehilangan autentisitasnya sebagai penganjur antikorupsi melalui iklan 'katakan tidak pada korupsi', tapi juga kian merontokkan integritasnya. Itu bahkan bisa menjadi perkara baru, yakni memberikan kesaksian palsu.

Bukalah Angie, katakan saja sejujurnya. Bukalah semua fakta. Dengan kejujuran itu, engkau ikut mengangkat moralitas koruptor yang sedang menggerogoti negeri ini.

TORIAL

# ergi Yudhoyono

GGUH berat tugas seorang Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, Yudhoyono harus mengurus negara. Saat yang sama, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Yudhoyono harus mengurus partai.

Ergi Yudhoyono idealnya lebih banyak tercurah untuk mengurus negara. Celakanya, belakangan ini energinya lebih banyak terkuras untuk mengurus Partai Demokrat yang dilanda prahara korupsi.

et lembaga pemantau media The Founding Father (FFH) pada 17 Maret hingga 31 Desember 2011 menemukan hal itu: FFH yang meneliti 43.300 materi publikasi (koran, 7 televisi, dan 7 media online (daring) menunjuk Yudhoyono paling banyak berkomentar tentang Nazaruddin.

aruddin ialah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menjadi terdakwa korupsi Wisma Atlet. FFH menemukan di media cetak Yudhoyono berkomentar seputar kasus Nazaruddin 19 kali (6%), berbanding dengan komentar tentang KTT ASEAN 17 kali (5%) dan perombakan kabinet 13 kali (4%).

Sudah saatnya pejabat negara

pemerintahan

askan jabatan

ai agar energi

a tercurah

nya untuk

"

anggapi ini melalui: indonesia.com

Di luar penelitian itu, bukti paling mutakhir bahwa energi paling banyak tercurah untuk partai ialah ketika dia marah atas rotasi Angellina Sondakh ke Komisi III DPR. Menilai rotasi Angie yang menjadi tersangka Wisma Atlet ke komisi yang membawahkan hukum tidak cerdas.

Sepintas tidak ada yang salah dengan amaran Yudhoyono itu karena dia melakukannya dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Akan tetapi, alangkah lebih baik jika energi amaran Yudhoyono ditujukan kepada para menteri yang tidak betas bekerja, misalnya.

Itulah yang namanya risiko rangkap jabatan. Rangkap jabatan tidak hanya mengandung risiko tetapi sering kali juga membuat pemangkuanya serbasalah.

Kondisi serbasalah itu pula yang dialami Yudhoyono. Ketika kasus korupsi Wisma Atlet yang melibatkan sejumlah kader Partai Demokrat mencuat, publik berharap Yudhoyono sebagai ketua dewan pembina partai terjun langsung menyelesaikan masalah itu.

Namun, ketika Yudhoyono turun langsung menyelesaikannya, publik menilai perhatian Yudhoyono lebih tercurah kepada partai. Penyebabnya ialah Yudhoyono dan pengurus partai tidak piawai menuntaskan persoalan korupsi yang membelit partai secara segera sehingga berlari-lari. Makin berlari-lari penyelesaian masalah partai, makin banyak pula waktu Yudhoyono yang tercurah untuk partai.

Semua itu mestinya menjadi pelajaran betapa dimudarnya rangkap jabatan. Sudah saatnya pejabat negara dan pemerintahan melepaskan jabatan di partai agar energi mereka tercurah seluruhnya untuk negara.

Seorang pemimpin pernah berkata, *"My loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins."*

## Belajar dari Jerman

Selasa, 21 Februari 2012 00:01 WIB

TEGERI ini terlampau sedikit menyimpan hal-hal yang baik untuk dijadikan panduan sehingga, untuk hal sepele pun, kita harus belajar dari luar negeri. Misalnya, untuk sekadar memiliki rasa malu, kita mesti berguru ke negeri orang.

Presiden Jerman Christian Wulff mengajarkan rasa malu itu kepada kita. Wulff memilih mundur dari jabatan presiden pada Jumat (17/2), karena malu diguncang pemberitaan skandal korupsi.

Salah satu kesalahan yang dilakukan Wulff. Dia diduga kuat menerima fasilitas saat meminjam dana dari bank untuk renovasi rumahnya sebelum menjadi presiden. Kedua, Wulff diduga menekan harian Jerman *Bild* yang memberitakan skandal korupsi itu.

Wulff bukanlah sosok pengecut. Dia menggelar konferensi pers di Istana Presiden, Berlin, bersama istrinya, Bettina. Dengan cara tegas Wulff mengatakan Jerman membutuhkan presiden yang didukung publik. Namun, kepercayaan itu makin tergerus dan mulai mengganggu. Itulah alasan Wulff mundur.

Berapa orang saja Wulff bukanlah tokoh pertama yang mengundurkan diri saat duduk di puncak singgasana kekuasaan. Di Jerman, banyak menteri mundur karena tuduhan korupsi.

Salah satu contoh di tahun 2011 paling kurang lima menteri Brasil melepaskan jabatan karena diguncang skandal korupsi. Juga di Jepang dan Korea, banyak pejabat mundur bahkan bunuh diri karena terbelit isu korupsi.

Menundurkan diri Wulff mengajarkan moral, etika, dan rasa malu. Para pejabat publik mestinya memiliki standar tentang nilai-nilai yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Pejabat juga harus memelihara perasaan enggan melakukan sesuatu yang nista. Itulah rasa malu.

Namun, moral, etika, dan rasa malu para pejabat publik kita sudah lama luntur. Pejabat publik di sini meski sudah menjadi tersangka, terdakwa, atau bahkan telah divonis masuk bui karena perkara korupsi pun, enggan mundur. Jabatan dan kekuasaan dijadikan tameng untuk berlindung.

Skandal korupsi muncul hampir setiap hari melibatkan baik pejabat pemerintah, DPR, maupun hakim, jaksa, dan polisi. Ada kasus Wisma Atlet, ada perkara proyek Hambalang, ada skandal Bank Century, dan sejumlah kasus korupsi lain yang diduga melibatkan para elite negara.

Salah satu nama anggota DPR, ketua umum partai, hingga menteri sudah terus terang disebut dalam sidang pengadilan. Namun, tidak seorang pun memberi contoh secara sukarela menanggalkan jabatannya karena malu.

Rasa malu memang sudah hilang dari para pejabat publik kita. Padahal, rasa malu merupakan kekuatan preventif yang membentengi seseorang melakukan tindakan hina seperti korupsi. Jika elite tidak lagi memiliki rasa malu, mereka mudah dikuasai nafsu keserakahan.

Seharusnya memprihatinkan negeri ini. Sekadar rasa malu pun kita sudah tidak punya sehingga harus belajar dari luar.

[www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)

DIAL

# lan Garong Anggaran

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR cuma 86 atau 15% dari 560 anggota dewan. Akan tetapi, kekuasaan segelintir orang itu sangat besar. Percaya atau tidak, inilah yang menentukan nasib bangsa. Inilah wujud kekuasaan banggar ialah bersama pemerintah menetapkan pendapatan negara sekaligus menentukan prioritas bagi kementerian dan lembaga. Kekuasaan itu dipakai penuh tanggung jawab, rakyat ngeri.

Apalagi, jika kekuasaan itu dipakai untuk politik transaksional rakyat dan negara ini. Inilah yang menjadi transaksi itulah yang kini terjadi, berjalan selang pergeseran pola korupsi di Indonesia. Dahulu pernah berkongsi dengan pejabat untuk mendapatkan kontrak pengusaha berkolusi dengan politikus di Banggar DPR.

ini mestinya  
PK tidak lagi  
hambatan  
sebab  
12 sudah  
kan."

Setidaknya ada tiga kasus korupsi kakap yang disebut-sebut melibatkan anggota banggar. Ketiganya yaitu kasus Wisma Atlet, kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan kasus korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) 2011.

Tidak itu saja. Laporan tertulis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komisi III DPR pada 20 Februari menyebutkan saat ini PPATK sedang menganalisis 16.000 laporan terkait dengan anggota DPR dan transaksi dilakukan anggota Badan Anggaran DPR.

inggapi  
in melaku,  
donesia.com

Meski aroma bau busuk korupsi sudah lama tercium, sejauh ini baru dua anggota banggar yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Pertama, Wa Ode Nurhayati dari Fraksi Partai Amanat Nasional dalam kasus PPID 2011. Padahal, Wa Ode itulah yang pertama kali membuka borok banggar.

Kedua, Angelina Sondakh dari Fraksi Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Wisma Atlet. Sebaliknya, Wayan Koster dari PDIP cuma dikenal status cegah bepergian ke luar negeri.

KPK berjalan lambat, amat lambat, mengusut korupsi yang melibatkan banggar. Padahal, KPK telah memeriksa empat pemimpin banggar pada 20 September 2011 terkait dengan kasus Wisma Atlet dan sogok di Kemenakertrans. KPK juga sudah mengeledah ruang banggar.

Sudah lima bulan terlewat sia-sia sejak KPK memeriksa Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng (Golkar) dan tiga Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir (Demokrat), Oly Dondokambey (PDIP), dan Tamsil Lintang (PKS). KPK hingga kini tak kunjung menjelaskan hasil pemeriksaan, apalagi meningkatkan status para terperiiksa.

Jika semula gagap mengusut lantaran banggar mengancam mogok membahas RAPBN 2012, KPK kini mestinya tidak lagi memiliki hambatan psikologis sebab APBN 2012 sudah diundangkan.

Temuan 2.000 rekening mencurigakan anggota DPR yang mayoritas dilakukan anggota banggar harus dijadikan KPK sebagai momentum memberantas mafia anggaran di DPR. Jika momentum itu dibiarkan berlalu, sama saja KPK membiarkan badan anggaran menjelm menjadi badan garong anggaran.

# DITORIAL

## Lupa, Yang Mulia

JANG publik lagi-lagi disuguh dagelan konyol di panggung pengadilan. Saksi dan terdakwa kasus korupsi kerap dengan lengah melontarkan jurus tidak tahu, tidak ingat, tidak kenal, lupa untuk menghindari dari jeratan hukum. Kiat berkehit seperti itu juga diperlihatkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar kala bersaksi dalam sidang kasus suap di Kemenakertrans di Pengadilan Negeri Jakarta, dengan terdakwa Dadong Irbarelawan dan Nyoman Suisnaya, Senin (20/2).

Dadong dan Nyoman, dua pejabat di Kemenakertrans, ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Agustus silam karena menerima uang suap Rp15 miliar dari kuasa perusahaan PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, terkait dengan proyek dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi.

Adalah petaka mengerikan jika yang mulia jaksa, yang mulia pengacara, dan yang mulia hakim ikut terbawa arus pusaran.

Dharnawati sendiri sudah divonis dua tahun enam bulan oleh KPK pada Januari lalu. Dalam kesaksiannya, Muhaimin tidak jarang melontarkan kata tidak tahu dan lupa. Jurus yang sama juga digunakan Menpora Andi Mallarangeng saat menjadi saksi dalam kasus suap Wisma Adee dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin, kemarin.

Dharnawati sendiri sudah divonis dua tahun enam bulan oleh KPK pada Januari lalu. Dalam kesaksiannya, Muhaimin tidak jarang melontarkan kata tidak tahu dan lupa. Jurus yang sama juga digunakan Menpora Andi Mallarangeng saat menjadi saksi dalam kasus suap Wisma Adee dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin, kemarin.

lakan tanggap  
lional ini melalui:  
ediaindonesia.com

Trik tidak tahu dan lupa memang bukan monopoli Muhaimin dan Andi Mallarangeng. Banyak pejabat dan politikus juga memakainya di panggung pengadilan. Tidak mengherankan jika di ruang pengadilan acap kali terdengar frasa tidak tahu, Yang Mulia, tidak ingat, Yang Mulia, atau lupa, Yang Mulia.

Meminjam bahasa gaul anak sekarang, lupa dan tidak ingat dapat dibaca sebagai eror yang diidap seseorang. Ada yang erornya total permanen terhadap segala perkara alias gila, ada yang erornya parsial alias hanya untuk kasus tertentu, dan ada pula yang erornya temporer alias pura-pura.

Celakanya, mereka yang eror itu—apa pun klasifikasinya—masih saja dipertahankan untuk memegang jabatan-jabatan publik. Jadi, sesungguhnya eror itu tidak cuma menghinggap individu, tapi juga sudah merambat institusi, bahkan sistem.

Boleh jadi, bangsa ini tergolong bangsa yang sakit karena banyak jabatan publik diisi mereka yang eror.

Apa pun alasannya, orang-orang eror ini jelas tidak pantas dan tidak layak menduduki posisi-posisi strategis. Jurus tidak ingat dan lupa di panggung pengadilan itu haruslah dipandang bahwa daya ingat mereka tidak memenuhi standar untuk tetap menjadi penyelenggara negara.

Adalah petaka mengerikan jika yang mulia jaksa, yang mulia pengacara, dan yang mulia hakim ikut terbawa oleh arus pusaran eror yang sengaja menciptakan amnesia hukum.

# EDITORIAL

## Keberanian Jalan Pintas

GERAKAN harga minyak dunia sudah tidak terkendali. Tegangan antara Iran dan negara-negara Barat memantik kenaikan harga emas hitam itu di pasar internasional. Harga minyak mentah *brent* di London, kemarin, mecha-US\$122,9 per barel.

Artinya harga minyak dunia bergerak semakin menjauhi asumsi makro APBN 2012, yakni US\$90 per barel.

Harga minyak dunia yang selangit itu sudah tentu membebani APBN. Tidak ada cara lain, pemerintah mesti kurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar anggaran negara tetap sehat. Untuk itu, pemerintah tidak boleh mengutamakan popularitas dan pencitraan ketimbang mengikuti logika ekonomi.

Sampai ini, pemerintah hanya mengejar tenggat pemutusan subsidi BBM mulai 1 April sesuai dengan perintah Undang-Undang APBN 2012.

2 Terus-menerus memproduksi wacana akan mencekik leher sendiri karena harga minyak dunia bergerak menjauhi asumsi makro APBN 2012."

Sudah ada tiga opsi yang disiapkan pemerintah, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi, mengalihkan penggunaan BBM ke BBG, dan mengharuskan mobil pribadi memakai BBM nonsubsidi, seperti pertamax.

Pilihan paling cerdas dari tiga opsi itu ialah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hanya, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi terbentur Pasal 7 UU APBN 2012 yang menolak adanya kenaikan harga BBM.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa pengendalian anggaran subsidi BBM 2012 akan dilakukan melalui pengalokasian yang lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsinya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengendalian konsumsi ialah hanya melalui pembatasan konsumsi premium untuk kendaraan roda empat milik pribadi di Jawa-Bali sejak 1 April 2012.

Itulah pasal bunuh diri yang menghalangi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasal itu sesungguhnya tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang memungkinkan penyesuaian APBN apabila terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN.

Tidak ada pilihan lain, Presiden dan DPR mesti merevisi Pasal 7 UU APBN 2012. Menunggu revisi melalui APBN perubahan terlalu lama, sekitar pertengahan tahun ini. Hanya ada satu jalan pintas, yaitu Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pada saat menaikkan harga BBM bersubsidi.

Jalan pintas itu butuh keberanian politik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (22/2) mengatakan harga BBM bersubsidi harus naik agar Indonesia dapat bertahan dari dampak krisis dunia. Pernyataan yang tegas, tetapi tegas di tataran wacana saja.

Padahal, terus-menerus memproduksi wacana akan mencekik leher sendiri karena harga minyak dunia terus bergerak menjauhi patokan APBN 2012. Sebagai rujukan, Tim Pengawasan Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi yang dipimpin Anggiro Abimanyu sudah lama merekomendasikan kenaikan harga BBM bersubsidi hingga Rp500 per liter.

Pemerintah tidak perlu malu-malu, tinggal menjalankan rekomendasi itu. Kata Gus Dur, gitu saja kok repot.

an tanggap  
ial ini melalui:  
iaindonesia.com

## Penjara yang Manusiawi

Abtu, 25 Februari 2012 00:00 WIB

ENJARA telah menjadi tempat penyiksaan baru bagi kaum terdakwa. Alih-alih memperbaiki, penjara justru membuat perilaku kriminal dan para pelanggar hukum menjadi lebih buruk.

ulah yang kita lihat dari keributan yang pecah di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan, Denpasar, Bali, Rabu (22/2). Para narapidana membakar gedung perkantoran LP terbesar di Bali itu.

erusuhan dipicu ketidakpuasan narapidana atas penanganan keributan yang terjadi di LP itu pada Minggu (19/2). Mereka mengamuk karena merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dari petugas.

ga narapidana harus ditembak karena menyerang polisi dengan batu batako. Insiden itu mengirim peringatan serius bahwa ada yang sangat keliru dalam pengelolaan penjara kita.

istiwa serupa sesungguhnya sudah nyaris meletus tahun lalu di Rutan Salemba, Jakarta, saat sekitar 30 tahanan mencoba menyerang petugas rutan. Ketika itu, para petugas Polsek dan Polres Jakarta Pusat datang tepat waktu hingga masih dapat mengendalikan agresivitas para tahanan.

lah satu akar persoalan yang diduga menjadi penyebab meledaknya amarah narapidana ialah kondisi hunian LP yang terlalu padat. LP Kerobokan, misalnya, dihuni 1.015 narapidana. Padahal, kapasitas penjara itu hanya 600 orang.

erusuhan serupa tentu saja berpotensi terjadi di penjara lain. Semua LP di negeri ini telah kelebihan penghuni.

malah penghuni LP Sorong, Papua, misalnya, 223 narapidana. Padahal, seharusnya penjara itu hanya dihuni sesuai dengan kapasitasnya, yakni 183 orang. Di Kalimantan Selatan, lebih parah lagi. Kapasitas total LP di wilayah itu hanyalah 1.578 orang. Namun, ada 4.093 narapidana dan tahanan yang harus tinggal di tempat itu.

ng lebih ekstrem terjadi di LP Teluk Dalam, Banjarmasin, yang saat ini dihuni 1.326 narapidana. Padahal, kapasitas LP itu hanyalah 336 orang.

cara nasional, overkapasitas LP di seluruh Indonesia mencapai sekitar 40 ribu narapidana.

ta acak itu telah memberi sinyal bahwa insiden yang jauh lebih buruk daripada Kerobokan dapat meletus sewaktu-waktu di banyak LP. Karena itu, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin tidak cukup hanya berdiri menunggu di emperan toko di seberang LP Kerobokan untuk menyelesaikan persoalan di LP secara lebih substantif.

rus dilakukan relokasi penghuni dari LP padat ke LP longgar penghuni, bila itu masih memungkinkan. Bila tidak, maka harus membangun penjara baru agar narapidana dapat menjalani hukuman lebih manusiawi.

enjara memang bukan tempat menyenangkan. Namun, kondisinya harus tetap layak agar narapidana tidak berubah menjadi individu yang lebih jahat.

[www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)



ORIAL

## geri Preman

ANISME di negeri ini kian edan. Premanisme se-  
garang memantik kecemasan dan menghadir-  
takutan di ruang publik. Eksistensi Polri sebagai  
ling dan pelayan masyarakat pun diuji.

gggu premanisme kuat mengikat dan gamblang dili-  
gan kasatmata. Di jalan-jalan, di perempatan lampu  
maupun di pasar, para preman berlaku lagak meme-  
merampas. Di terminal bus dan pelabuhan, mereka  
uasa memalak calon penumpang dan sopir.

ran ulah preman, transportasi publik yang seha-  
menjanjikan keamanan dan kenyamanan berubah  
arena horor. Di atas bus kota, para preman berke-  
gamen mengancam dengan dalih baru keluar dari

Untuk  
memberantas  
isme perlu

an yang  
jutaan. Pantang  
aparatus yang  
pat dengan

inggapi  
ni melalui:  
donesia.com

operasi, termasuk di kawasan milik militer. Pada  
2), misalnya, segerombolan orang membantai dua  
rumah duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat  
oto, Jakarta Pusat.

bui dan butuh uang untuk  
makan. Bahkan, angkutan  
kota dijadikan tempat untuk  
memerkosa mahasiswi dan  
pedagang sayur.

Premanisme berbungkus  
organisasi kemasyarakatan  
juga menggila.

Atas nama ormas, mereka  
bersaing menawarkan jasa  
pengaman atau penagih-  
an utang (*debt collector*).  
Mereka menjadi centeng ka-  
langan berduit untuk menin-  
das kaum tak berpunya.

Premanisme dengan se-  
gala wujudnya itu malah  
tak lagi memilah lokasi da-

Jelas sudah, perilaku preman sudah kelewat batas. Apakah  
itu harus dibiarkan? Publik jelas menjawab tidak. Kita juga  
yakini, aparat keamanan punya jawaban sama.

Akan tetapi, diakui atau tidak, selain akibat kemiskinan  
dan pengangguran, premanisme tumbuh dan menggurita  
karena pembiaran. Bukan rahasia lagi, banyak preman  
dipelihara oknum TNI atau Polri. Preman menjadi kepan-  
jangan tangan-tangan kotor mereka untuk mengeruk fulus  
dan keuntungan politik.

Ada simbiosis mutualisme, hubungan yang saling meng-  
untungkan. Tidak peduli rakyat menjadi korban, tak peduli  
meski hubungan tercela itu juga mengakibatkan ongkos  
ekonomi tinggi.

Memberantas premanisme memang tidak gampang, tetapi  
akan lebih sulit jika aparat keamanan justru larut dalam  
profesi destruktif itu. Polri selalu bersemangat menabuh  
genderang perang terhadap preman ketika ada kejadian  
besar, seperti kasus John Kei dan pembantaian di RSPAD.

Celakanya, ketegasan mereka itu kerap bersifat sesaat.  
Tabiat pembiaran selalu saja terulang sehingga premanisme  
mendapatkan ruang yang nyaman untuk mengangkangi  
hukum.

Untuk memberantas premanisme perlu ketegasan yang  
berkelanjutan. Pantang ada lagi aparat yang bersahabat de-  
ngan preman. Di situlah kredibilitas Polri dipertaruhkan.

Jika gagal, negeri ini mustahil terbebas dari teror tirani  
minoritas berwujud preman. Indonesia pun akan dicap se-  
bagai negara gagal, *failed state*, dalam menjamin keamanan  
rakyatnya.



RIAL

## Rekening Buncit Pegawai Pajak

Ditjen Pajak sungguh menjadi lumbung duit yang nekat memperkaya diri. Para pegawai di situ seperti berlomba mengumpulkan harta dalam rekening pribadi, simpanan istri, dan anggota lainnya.

Contohnya, Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak I A, menjadi salah seorang miliarder kesohor. Kini mendekam di bui karena dihukum Mahkamah Agung penjara.

Sementara itu, mantan pegawai pajak yang mempunyai rekening adalah Bahasyim Assifie. Bahasyim memiliki rekening Rp64 miliar. Mahkamah Agung menghukumnya 12 tahun penjara.

ngan  
ahkan  
berang-  
h ba-  
kat pajak  
an di  
k."

Hukuman terhadap Gayus dan Bahasyim tidak membuka mata karyawan Ditjen Pajak lainnya. Buktinya kini muncul lagi nama Dhana Widyatmika. Karyawan Ditjen Pajak itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena rekeningnya mencurigakan.

Duit sekitar Rp60 miliar tersimpan di rekeningnya. Awalnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai rekening obesitas itu. Sebagai pegawai negeri sipil golongan III C,

Rekening buncit Dhana sungguh mencengangkan. Itulah yang kemudian dilaporkan ke Kejaksaan

Rekening gendut karyawan Ditjen Pajak itu bisa siapa yang taat membayar pajak kehilangan kepada negara. Untuk apa orang jujur membalas yang tidak jujur justru diuntungkan dan

Buktinya, hingga sekarang tidak ada satu pun pihak yang menggendutkan rekening Gayus dan Bahasyim yang masuk penjara.

Kepercayaan wajib pajak pun bisa kian tergerus karena sejak meletus kasus Gayus, Ditjen Pajak belum juga menemukan mekanisme pengawasan internal untuk mencegah pengurangan uang rakyat oleh karyawan Ditjen Pajak. Kasus Dhana menunjukkan karyawan Ditjen Pajak masih leluasa melahap uang pajak untuk memperkaya diri dan kerabat.

Kasus dugaan penggelapan pajak oleh Dhana juga dengan jelas menunjukkan program remunerasi tidak berpengaruh bagi integritas, moral, dan produktivitas pegawai negeri sipil. Padahal, program remunerasi justru pertama kali dilakukan di Ditjen Pajak pada 2007.

Program remunerasi pertama kali diterapkan di Ditjen Pajak, tentu saja dengan pertimbangan matang. Penerimaan negara terbesar bersumber dari pajak yang dalam APBN 2012 mencapai Rp1.032 triliun. Jumlah itu naik 18,21% jika dibandingkan dengan pada 2011 yang mencapai Rp872,6 triliun.

Karena itu, aparat pajak haruslah benar-benar orang jujur.

Kita tidak ingin berprasangka buruk bahwa banyak karyawan Ditjen Pajak terlibat mafia. Namun, kita juga perlu mengingatkan bahwa mafia tidak bekerja sendirian. Dia seperti gurita.

Kasus Dhana jelas dan tegas menunjukkan mafia pajak belum sepenuhnya diungkap dan diberantas. Karena itu, jangan salahkan publik jika beranggapan masih banyak sindikat pajak gentayangan di Ditjen Pajak.